

**USAHA ASEAN DALAM PENYELESAIAN
KONFLIK ROHINGYA DENGAN
MENGUNAKAN ASEAN WAY
2012-2016**

SKRIPSI



**Disusun Oleh:
MOHAMMAD IRFAN NABIL
20140510276**

**JURUSAN ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
YOGYAKARTA
2018**

HALAMAN JUDUL

**USAHA ASEAN DALAM PENYELESAIAN
KONFLIK ROHINGYA DENGAN
MENGUNAKAN ASEAN WAY
2012-2016**

SKRIPSI

Diajukan Guna Memenuhi Persyaratan untuk
Memperoleh Gelar Sarjana, Strata 1 (S-1) pada fakultas
Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Ilmu
Hubungan Internasional

Disusun oleh :

Mohammad Irfan Nabil

20140510276

Dosen Pembimbing:

Dian Azmawati, S.IP., M.A.

**JURUSAN ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
YOGYAKARTA
2018**

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

USAHA ASEAN DALAM PENYELESAIAN KONFLIK ROHINGYA DENGAN MENGGUNAKAN ASEAN WAY 2012-2016



MOHAMMAD IRFAN NABIL

20140510276

Telah dipertahankan, dinyatakan **Lulus** dan disahkan dihadapan
Tim Penguji Skripsi Program Studi Hubungan Internasional
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, pada;

Hari/tanggal : Senin, 1 September 2018

Waktu : 08.00 WIB

Tempat : Ruang E4. 006

Tim Penguji:

Sugeng Riyanto, S.IP., M.Si.

Ketua Tim Penguji

Prof. Dr. Tulus Warsito, M.Si.

Penguji I

Dian Azmawati, S.IP.,M.A.

Penguji II

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar sarjana, baik di Universitas Muhammadiyah maupun perguruan tinggi lain.

Dalam skripsi saya tidak terdapat karya, ide dan pendapat orang lain, terkecuali tertulis dengan jelas referensi yang dicantumkan dalam skripsi dengan disebutkan nama dan dicantumkan daftar pustaka.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Yogyakarta, 8 September 2018

Matrei Rp. 6.000,-

MOHAMMAD IRFAN NABIL

HALAMAN MOTTO

You miss 100% of the shots you don't take.

(Wayne Gretzky)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirrobbilalamin, tugas akhir ini saya persembahkan kepada:

1. Kedua Orang tua penulis Bapak Erman Rusdi dan Ibu Lena Heryani tercinta atas semua yang telah diberikan kepada penulis, baik kesabaran, perhatian, kasih sayang, dan doa tiada henti.
2. Kepada Saudara Penulis, Fuad El Ahmed dan Gina Amalia. Semoga skripsi ini dapat menjadi pemicu dalam menuntut ilmu kedepannya.
3. Kepada keluarga besar Penulis. Terima kasih telah memberikan semangat agar saya bisa menyelesaikan Skripsi ini.
4. Kepada Pembimbing skripsi Ibu Dian Azmawati, S.IP., M.A yang telah membimbing proses penulisan skripsi selama ini, serta meluangkan waktu, pikiran dan tenaganya untuk dapat membimbing saya hingga skripsi ini dapat diselesaikan.
5. Kepada teman-teman seperjuangan dari SMA Muhammadiyah 1 Palembang hingga kini berkuliah di Yogyakarta, Ade, Rizqi, Hadi, dan Arief.
6. Kepada sahabat-sahabat kontrakan, Ikkal, Doli, Marzuk, Ulul, Anas, Evan, Fauzan, Emon (Sadiqi), Didi. Terima kasih telah berkerja sama dari proses menuntut ilmu di perkuliahan, hingga proses penulisan skripsi ini.
7. Terima kasih untuk Alvin, Nisa, Whiby, Chanif, Dwiyan dan semua teman-teman lainnya yang turut membantu dan memotivasi penulis untuk mengerjakan skripsi ini.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum, Wr. Wb.

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga tugas akhir dalam perkuliahan Strata Satu ini dapat terselesaikan. Tak lupa pula penulis sampaikan sholawat serta salam kepada Nabi Muhammad SAW yang telah meninggikan derajat manusia dan membawa manusia dari zaman jahiliyah ke zaman pencerahan. Skripsi yang penulis susun dengan judul “Usaha ASEAN Dalam Penyelesaian Konflik Rohingya Dengan Menggunakan ASEAN Way” merupakan salah satu syarat kelulusan dan memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1). Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis telah menerima banyak dukungan, bimbingan, serta bantuan yang sangat bermakna dari berbagai pihak. Semoga karya ilmiah ini menjadi ilmu yang bermanfaat serta berkontribusi bagi kemajuan bangsa. Melalui kata pengantar ini penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih kepada berbagai pihak antara lain:

1. Bapak Dr.Ir.Gunawan Budiyanto, M.P selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
2. Ibu Dr. Titin Purwaningsih, S.IP., M.Si, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, yang membantu penulis dalam mengurus segala berkas keperluan akademik.
3. Ibu Dr. Nur Azizah, M.Si, selaku Kepala Program Studi Ilmu Hubungan Internasional Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
4. Ibu Dian Azmawati, S.IP., M.A selaku dosen pembimbing, yang selalu memberikan pencerahan dan

masukannya ketika setiap kali penulis melakukan bimbingan skripsi.

5. Bapak Sugeng Riyanto, S.IP., M.Si dan Prof. Dr. Tulus Warsito, M.Si. selaku dosen penguji, yang telah mengkritisi dan memberikan saran dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Seluruh Dosen Prodi Ilmu Hubungan Internasional UMY, terima kasih atas ilmu pengetahuannya yang selama ini telah diajarkan kepada saya selama perkuliahan, dan kepada administrasi TU HI Pak Jumari, dan Pak Waluyo yang membantu proses administrasi di jurusan berjalan lancar.
7. Terimakasih kepada seluruh teman-teman yang tidak bisa sebutkan satu per satu telah membantu penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini.

Wassalamualaikum, Wr. Wb.

Yogyakarta, 7 September 2018

Mohammad Irfan Nabil

ABSTRAK

Rohingya ethnicity in Myanmar has suffered due to discrimination from Myanmar government since the enactment of Myanmar's citizenship law in 1982. Besides discrimination from the local government, Rohingya also suffered from a series of conflicts with Arakanese Buddhist and Myanmar Army (Tatmadaw). This paper will explain ASEAN's efforts in resolving Rohingya conflicts from 2012 until 2016. ASEAN's efforts in stopping human rights violations against ethnic Rohingya by using the principles in the ASEAN Way. The Study uses The concept of the role of international organizations by Karen Mingst and The concept of ASEAN Way.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
DAFTAR TABEL.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	15
A. Latar Belakang Masalah.....	15
B. Rumusan Masalah	19
C. Landasan Teoritik.....	19
1. Konsep Peran Organisasi Internasional.....	19
2. Konsep ASEAN Way	24
D. Hipotesa.....	26
E. Tujuan Penelitian.....	26
F. Batasan Penelitian	26
G. Metode Penelitian.....	27
1. <i>Metode Analisis</i>	27
2. <i>Teknik Pengumpulan Data</i>	27
H. Sistematika Penulisan.....	27
BAB II SEJARAH KONFLIK ETNIS ROHINGYA DI MYANMAR.....	29

A.	Sejarah Etnis Rohingya di Rakhine.....	29
B.	Diskriminasi Myanmar Terhadap Etnis Rohingya.....	35
BAB III DINAMIKA POLITIK ASEAN DALAM		
KONFLIK REGIONAL 49		
A.	Sejarah ASEAN.....	49
B.	ASEAN Way dalam Penyelesaian Konflik di Asia Tenggara.....	55
1.	<i>Sengketa Sabah Antara Filipina dan Malaysia.....</i>	<i>55</i>
2.	<i>Sengketa Kamboja dan Thailand atas Kuil Preah Vihear.....</i>	<i>58</i>
3.	<i>Intervensi ASEAN pada Krisis Topan Nargis di Myanmar.....</i>	<i>61</i>
BAB IV ASEAN WAY DALAM PENYELESAIAN		
KONFLIK ROHINGYA..... 65		
A.	Konflik Antara Etnis Rohingya dan Etnis Rakhine 2012	66
1.	<i>ASEAN Foreign Ministers Meeting (AMM) ke-45 (2012).....</i>	<i>66</i>
2.	<i>ASEAN Summit ke-21 (2012).....</i>	<i>68</i>
B.	Krisis Manusia Perahu (2015).....	70
1.	<i>Pertemuan Trilateral Indonesia Malaysia Dan Thailand.....</i>	<i>73</i>
2.	<i>Pertemuan Antara Menlu Indonesia dan Menlu Myanmar.....</i>	<i>75</i>
3.	<i>Special Meeting on Irregular Migration in the Indian Ocean di Thailand.....</i>	<i>76</i>
4.	<i>Emergency ASEAN Ministerial Meeting on Transnational Crime.....</i>	<i>77</i>
C.	Konflik Antara Etnis Rohingya dan Militer Myanmar Tahun 2016.....	78
1.	<i>Respon Malaysia dan Indonesia.....</i>	<i>80</i>

2. <i>Pertemuan Retreat Menlu ASEAN di Myanmar</i>	81
BAB V KESIMPULAN	85
DAFTAR PUSTAKA	89

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Peta Persebaran Etnis-etnis di Myanmar	31
Gambar 2. 2 Para Pengungsi yang Tiba di Perairan Thailand	47
Gambar 3. 1 Lambang ASEAN	50
Gambar 3. 2 Penandatanganan Deklarasi Bangkok	52
Gambar 3. 3 Peta Wilayah Filipina di Sabah	56
Gambar 3. 4 Peta Wilayah Sengketa Antara Kamboja Myanmar	59
Gambar 3. 5 Armada Angkatan Laut AS di Laut Andaman ..	62
Gambar 4. 1 Pergerakan Pengungsi Rohingya Menggunakan Perahu Tahun 2014-2015	73
Gambar 4. 2 Pertemuan Antar Menteri ASEAN Membahas Isu Irregular Movement	77

DAFTAR TABEL

Tabel 4. 1 Timeline Penyelesaian Permasalahan Konflik Rohingya Saat Operasi Militer 2016	83
---	----

BAB I

PENDAHULUAN

Etnis Rohingya yang bermukim di Negara Myanmar telah mengalami penderitaan berkepanjangan akibat tindakan diskriminatif Pemerintah Myanmar. Diterbitkannya UU Kewarganegaraan Myanmar tahun 1982 mengakibatkan etnis Rohingya tidak diakui sebagai warga negara Myanmar. Akibatnya, serangkaian hak-hak dasar seperti menerima pendidikan dan akses kesehatan tidak dapat mereka dapatkan. Selain mengalami diskriminasi, konflik komunal antara etnis Rohingya dan kaum Buddhis Rakhine pada tahun 2012 telah menambah penderitaan yang dialami etnis Rohingya.

ASEAN sebagai organisasi pemerintah internasional di regional Asia Tenggara memiliki kewajiban untuk berperan dalam penyelesaian permasalahan ini. Untuk ikut berperan, ASEAN diharuskan menaati berbagai prinsip-prinsip yang telah diciptakan organisasi ini. Prinsip-prinsip yang biasa dikenal dengan istilah *ASEAN Way* telah menjadi pedoman bagi ASEAN untuk menyelesaikan berbagai permasalahan secara damai di regional Asia Tenggara.

A. Latar Belakang Masalah

Untuk mengatasi berbagai permasalahan secara damai, ASEAN selalu menggunakan berbagai prinsip-prinsip yang terdapat pada *Treaty of Amity and Cooperation (TAC)*. Pada pertemuan ASEAN tahun 1976 di Bali, negara-negara anggota ASEAN menyetujui perjanjian ini, yang menyepakati (1) saling menghormati kemerdekaan, kedaulatan, kesetaraan, integritas wilayah, dan identitas nasional segala bangsa, (2) hak setiap negara untuk memimpin eksistensi negaranya bebas

dari campur tangan, subversi, ataupun paksaan dari pihak luar, (3) prinsip tidak campur tangan dalam hubungan internal satu dengan yang lainnya, (4) penyelesaian perbedaan atau sengketa dengan cara damai, (5) penolakan terhadap ancaman atau penggunaan kekerasan, (6) kerjasama efektif antar sesama negara anggota.¹ Prinsip-prinsip ini digunakan ASEAN sebagai cara khas untuk menyelesaikan permasalahan di kawasan Asia Tenggara. Cara khas ini juga disebut dengan *ASEAN Way*.

Pada intinya, *ASEAN Way* merupakan sebuah prinsip, identitas, serta karakter negara-negara Asia Tenggara yang mengedepankan prinsip non-intervensi dan konsensus sebagai dasar pemecahan masalah mereka. Prinsip non-intervensi adalah sebuah prinsip damai dan anti-kekerasan, menghargai dan menghormati kedaulatan masing-masing negara, serta memfokuskan diri pada pendekatan-pendekatan informal untuk menyelesaikan sengketa dan konflik yang terjadi, baik di level domestik, regional, maupun global. Alasan dibentuknya *ASEAN Way* juga sebagai pencegah adanya dominasi power dari salah satu pihak untuk bertidak sembarangan. Selain itu, *ASEAN Way* juga menggiatkan penggunaan dialog dan musyawarah sebagai jalan untuk menyelesaikan masalah.

Sementara itu, ASEAN kini tengah menghadapi persoalan panjang antara etnis Rohingya dan Negara Myanmar. Rohingya sebagai etnis minoritas di Myanmar telah

¹ Cipto, B. (2006). *Hubungan Internasional di Asia Tenggara: Teropong terhadap Dinamika, Realitas dan Masa Depan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. p. 23

mengalami diskriminasi selama puluhan tahun. Pemerintah Myanmar melalui UU Kewarganegaraan Myanmar tahun 1982, tidak mengakui etnis Rohingya sebagai warga negara. Tindakan ini berdampak pada sulitnya etnis Rohingya untuk mendapatkan akses kesehatan, pendidikan dan perumahan yang layak.

Selain mendapatkan diskriminasi dari pemerintah Myanmar, pada tahun 2012 terjadi konflik antara etnis Rohingya yang merupakan mayoritas di wilayah Rakhine Utara dan umat Buddha nasionalis yang merupakan mayoritas di wilayah Rakhine selatan. Sebelum kerusuhan terjadi, terdapat kekhawatiran luas yang beredar di kalangan umat Buddha Rakhine bahwa mereka akan segera menjadi minoritas di wilayah Rakhine selatan maupun utara. Kekhawatiran ini diperparah dengan menyebarnya kabar bahwa telah terjadi perampokan, pemerkosaan dan pembunuhan yang dilakukan tiga pemuda muslim terhadap seorang gadis Buddha bernama Ma Thida Htwe.

Bentrokan antara etnis Rohingya dan umat nasionalis Buddha pun meletus, tercatat setidaknya 88 orang tewas dan puluhan ribu etnis Rohingya kehilangan tempat tinggalnya.

Insiden kembali terjadi kali ini antara pasukan militer negara Myanmar dengan kelompok pemberontak *Arakan Rohingya Salvation Army* (ARSA) pada bulan Oktober 2016. Kelompok ARSA dilaporkan bertanggung jawab atas penyerangan tiga pos perbatasan Myanmar di sepanjang perbatasan Myanmar dengan Bangladesh. . Beberapa lusin senjata api dan kotak amunisi dicuri oleh penyerang dari pos perbatasan. Serangan tersebut mengakibatkan terbunuhnya sembilan petugas perbatasan dan empat tentara Myanmar terbunuh dua hari kemudian

Menyusul terjadinya peristiwa penyerangan pada bulan Oktober tersebut, militer Myanmar memulai operasi pembersihan di negara bagian Rakhine Utara. Pada operasi militer ini, puluhan warga dibunuh dan setidaknya 230 warga ditangkap. Kelompok-kelompok Hak Asasi Manusia memperkirakan angka kematian mencapai ratusan jiwa. Pihak militer juga memberlakukan jam malam dan memblokir bantuan makanan yang berasal dari *World Food Programme* (WFP). Beragam peristiwa kekerasan tersebut terus berlanjut hingga tahun 2017.

Berdasarkan keterangan dari *United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs* (OCHA), kekerasan yang terjadi di negara bagian Rakhine, Myanmar telah menyebabkan setidaknya 600.000 pengungsi etnis Rohingya telah melarikan diri melintasi perbatasan dari Myanmar ke Bangladesh. Pengungsi yang tiba di Bangladesh - kebanyakan wanita dan anak-anak - mengalami trauma, dan beberapa di antaranya menderita luka akibat tembakan, pecahan peluru, kebakaran dan ranjau darat. Selain menuju Bangladesh, ribuan pengungsi juga telah melarikan diri ke negara-negara Asia Tenggara.

Untuk mengatasi permasalahan kekerasan Hak Asasi Manusia (HAM) seperti yang terjadi pada konflik Rohingya di Myanmar, pada tahun 2012, ASEAN telah mengadopsi Deklarasi Hak Asasi Manusia ASEAN. Deklarasi ini berisikan pengakuan terhadap semua hak sipil dan politik yang diatur dan berada pada *Universal Declaration of Human Rights*. Selain itu, deklarasi ini juga mengakui pentingnya peran *ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights* (AICHR), sebagai institusi penanggung jawab utama bagi pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia di ASEAN. Namun, adanya prinsip non-intervensi dalam *ASEAN Way* dan tertutup atau terisolasinya Myanmar sejak kediktatoran militer

tahun 1962 hingga tahun 2011 mengakibatkan negara-negara anggota ASEAN lainnya kesulitan untuk melakukan intervensi dan membantu menyelesaikan permasalahan domestik di Myanmar.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan diatas, maka didapatkan pokok permasalahan sebagai berikut: “Bagaimana Usaha ASEAN dalam Menyelesaikan Konflik Rohingya dengan Menggunakan Prinsip *ASEAN Way*?”

C. Landasan Teoritik

1. Konsep Peran Organisasi Internasional

Organisasi internasional di dunia modern kini dibagi dalam *Intergovernmental Organizations (IGOs)* dan *Internasional Non Governmental Organizations (INGOs)*. Baik IGOs maupun INGOs memiliki karakteristik yang sama. *Pertama*, IGOs maupun INGOs merupakan organisasi permanen yang menjalankan suatu kesatuan fungsi. *Kedua*, keanggotaannya bersifat sukarela bagi pihak-pihak yang memenuhi syarat. *Ketiga*, terdapat instrumen pokok yang menjelaskan tentang tujuan, struktur, dan metode operasional. *Keempat*, terdapat badan yang menjadi perwakilan semua anggota. *Kelima*, adanya sekretariat permanen yang menjalankan kegiatan-kegiatan administratif, penelitian, dan fungsi informasi secara berkesinambungan. IGOs juga didirikan oleh traktat dan biasanya melindungi kedaulatan

negara, beroperasi pada level *consent*, rekomendasi, dan kerja sama dibandingkan melalui paksaan atau tekanan.²

Organisasi internasional tidak hanya sebagai tempat di mana keputusan untuk berkerja sama dapat dicapai. Namun juga sebagai alat administratif untuk mengubah kebijakan menjadi *action*. Fungsi lainnya adalah untuk menyediakan saluran-saluran komunikasi di antara pemerintahan sehingga saling mengakomodasi kepentingan masing-masing dapat tereksplorasi dan juga memudahkan akses bagi pemecahan permasalahan yang muncul.³

Sebagai suatu entitas yang berdaulat, negara berhak membawa pertikaiannya ke organisasi internasional atau menolaknya. Mereka boleh menerima keputusan atau patuh dengan semangat resolusi yang diputuskan secara mayoritas oleh negara atau boleh menolak untuk bekerja sama menjalankan suatu rekomendasi. Apabila negara harus ditekan, hal ini dilakukan oleh negara anggota lain.⁴

Karen Mingst memberikan jабaran yang luas mengenai fungsi dari organisasi internasional.⁵

Pada tingkat internasional, Organisasi internasional berperan dalam:

1. Memberikan kontribusi untuk terciptanya suasana kerja sama di antara negara/aktor. Dengan adanya Organisasi

² Sugito. (2016). Dalam *Organisasi Internasional: Aktor dan Instrumen dalam Hubungan Internasional* (hal. 8). Yogyakarta: The Phinisi Press.

³ *Ibid.*, (hal. 9)

⁴ *Ibid.*

⁵ *Ibid.* (hal. 12)

Internasional, diharapkan negara-negara dapat saling bersosialisasi secara reguler.

2. Menyediakan informasi dan pengawasan.
3. Memberi bantuan terhadap penyelesaian konflik.
4. Mengkoordinir aktivitas internasional mengenai permasalahan bersama.
5. Menyediakan arena untuk *bargaining* bagi negara-negara dalam menyelesaikan suatu masalah.
6. Membentuk rezim internasional.

Sedangkan bagi suatu negara, Organisasi Internasional berfungsi sebagai:

1. Instrumen bagi politik luar negeri.
2. Sebagai alat legitimasi politik luar negeri.
3. Memperoleh informasi yang berharga bagi suatu negara.
4. Membatasi perilaku suatu negara yaitu menjaga suatu negara untuk mengambil tindakan tertentu dan menghukum terhadap negara yang mengambil tindakan salah.

Penderitaan etnis Rohingya akibat serangkaian konflik di tahun 2012 antara umat Buddha Rakhine melawan muslim Rohingya di negara bagian Rakhine utara Myanmar membawa tekanan kepada ASEAN untuk ikut berperan dalam menangani isu ini. Isu ini akhirnya dibahas pada KTT ASEAN ke-21 tahun 2012 di Kamboja.

Untuk membantu meredakan krisis kemanusiaan dari konflik di Rakhine, ASEAN telah menawarkan bantuan dalam bentuk kerja sama bersama pemerintah Myanmar dan Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB). Kerja sama antar tiga pihak ini pernah dilakukan dan efektif dalam pemberian bantuan kepada korban dari Topan Nargis di Myanmar pada

tahun 2008.⁶ Namun, tawaran ASEAN tersebut ditolak Myanmar dengan alasan bahwa konflik tersebut ialah urusan internal negara Myanmar, menurut Sekretaris Jendral ASEAN Surin Pitsuwan. Ia juga memperingatkan bahwa jika konflik ini tidak segera berakhir maka dapat meradikalisasi Muslim Rohingya dan dapat mengganggu kestabilan Asia Tenggara.

Pada KTT yang sama, Surin Pitsuwan juga berbicara langsung kepada perwakilan Myanmar dan Bangladesh. Baik Menteri Luar Negeri Myanmar Wunna Maung Lwin maupun Menteri Luar Negeri Bangladesh Dipu Moni menyetujui untuk tetap menginformasikan status dari etnis Rohingya pasca terjadinya konflik di daerah Rakhine, Myanmar.

Peran selanjutnya ialah ketika terjadi pemblokiran bantuan dari luar negeri oleh militer Myanmar yang diakibatkan oleh insiden antara pasukan militer negara Myanmar dengan kelompok pemberontak *Arakan Rohingya Salvation Army* (ARSA) pada bulan Oktober 2016. Akibat ketegangan ini Myanmar memulai operasi pembersihan di negara bagian Rakhine Utara. Pihak militer juga memberlakukan jam malam serta memblokir bantuan yang berasal dari luar negeri.

Isu ini langsung didiskusikan dalam pertemuan antar Menteri Luar Negeri ASEAN di Yangon pada tanggal 19 Desember 2016.⁷ Dalam pertemuan ini, Daw Aung San Suu

⁶ Kassim, Y. R. (2012, November 6). *Plight of the Rohingya: ASEAN Credibility Again at Stake*. Diambil kembali dari ReliefWeb: <https://reliefweb.int/report/myanmar/plight-rohingya-asean-credibility-again-stake>

⁷ Gerin, R. (2016, December 19). *Aung San Suu Kyi Discusses Rakhine Crisis With ASEAN Foreign Ministers*. Diambil kembali dari Radio Free Asia: <http://www.rfa.org/english/news/myanmar/aung-san-suu-kyi->

Kyi yang mewakili Penasihat Negara dan Menteri Luar Negeri Myanmar memberikan informasi terkini mengenai keadaan di negara bagian Rakhine. Selanjutnya juga menjelaskan upaya yang tengah dilakukan oleh Pemerintahan Myanmar dalam mengatasi keadaan tersebut.

Dalam pertemuan antar Menteri Luar Negeri ASEAN ini, Menteri Luar Negeri Malaysia memberikan kritik mengenai penanganan pemerintah Myanmar atas pelarangan kelompok-kelompok kemanusiaan memasuki Rakhine utara untuk memberikan bantuan. Menlu Malaysia juga meminta Myanmar untuk menegakkan Hak Asasi Manusia terhadap semua orang yang tinggal di negara tersebut.

Kritik yang sama juga disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Indonesia Retno L.P. Marsudi. Ia kembali mengingatkan bahwa perlindungan HAM dan penghormatan terhadap semua masyarakat, termasuk komunitas Muslim di negara bagian Rakhine, harus dilakukan dengan menggunakan pendekatan inklusif.

Akhir dari pertemuan ini menghasilkan keputusan bahwa Myanmar sepakat untuk memberikan "akses kemanusiaan yang diperlukan" ke Negara Bagian Rakhine yang bermasalah.⁸

discusses-rakhine-crisis-with-asean-foreign-ministers-12192016145727.html

⁸ Cochrane, L. (2016, December 19). *ASEAN meeting on Rohingya 'genocide' ends with humanitarian access promise*. Diambil kembali dari ABC News: <http://www.abc.net.au/news/2016-12-20/asean-meeting-on-rohingyas-secures-humanitarian-access-promise/8133666#>

2. Konsep ASEAN Way

ASEAN Way merupakan prinsip-prinsip khusus negara-negara anggota ASEAN dalam upaya penyelesaian masalah. Prinsip-prinsip tersebut tertuang pada *Treaty of Amity and Cooperation (TAC)* tahun 1976 yaitu :

1. *Mutual respect for the independence, sovereignty, equality, territorial integrity and national identity by the following fundamental principles*
2. *The right of every State to lead its national existence free from external interference, subversive or coercion*
3. *Non-Interference in the internal affairs of one another ;*
4. *Settlement of differences of disputes by peaceful means*
5. *Renunciation of the threat or use of force*
6. *Effective cooperation among themselves.*

Menurut Kao Kim Hourn, terdapat setidaknya lima prinsip tidak tertulis dalam mekanisme hubungan antar negara ASEAN yaitu (1) Berpegang kepada peraturan-peraturan dasar yang tercantun dalam berbagai traktat, deklarasi dan komunike ASEAN, (2) Prinsip menahan diri (*self restrain*) dan mendorong negara anggota lain yang bersengketa untuk menurunkan ketegangan dengan mengutamakan kestabilan kawasan, (3) Prinsip musyawarah dan mufakat, (4) Mediasi pihak ketika dalam manajemen konflik dan (5) Menyepakati ketidaksepakatan dengan menunda agenda yang gagal disepakati sehingga situasi untuk mendiskusikannya kembali memungkinkan.⁹

Mely Calbero menjabarkan dua metode yang digunakan ASEAN dalam penyelesaian konflik. Metode pertama ialah penyelesaian konflik melalui jalur institusional yang formal.

⁹ Chandrawati, N. (2006). *ASEAN Regional Forum dan Kontribusinya terhadap. Ketahanan Nasional Indonesia di bidang pertahanan dan keamanan. Periode 1994-2006*, 27.

Salah satu usaha ASEAN menyediakan metode penyelesaian konflik melalui jalur formal ialah dengan diciptakannya *Treaty of Amity and Cooperation*. Metode kedua ialah melalui jalur informal. Metode jenis ini dilakukan negara anggota ASEAN melalui cara-cara *conflict avoidance* (menghindari konflik), diplomasi bilateral, dan terakhir yang sangat khas dari ASEAN adalah musyawarah untuk mufakat.¹⁰ Mufakat dapat dihasilkan setelah melalui proses musyawarah di mana mayoritas maupun minoritas saling mendekati satu sama lain dengan menggunakan sudut pandang masing-masing. Penggunaan proses ini penting karena negara minoritas dapat bersuara secara terbuka tanpa merasa didominasi dari pandangan negara mayoritas. Dengan cara ini, semua negara memiliki suara yang setara, tanpa memandang ukuran atau kekuatan ekonominya.¹¹

Sebelum masalah dibahas melalui pertemuan yang formal, banyak persiapan yang biasa dilakukan negara-negara ASEAN untuk mengetahui reaksi negara yang dituju atas proposal yang akan diajukan. Persiapan ini dilakukan agar proposal tersebut dapat diperbaiki ulang sebelum diajukan secara resmi. Persiapan-persiapan ini dapat berbentuk pertemuan biasa, bermain golf, bernyanyi di karaoke, hingga makan durian bersama. Pertemuan informal ini dapat mendekatkan birokrat ASEAN satu sama lain, dan juga dapat

¹⁰ Simbolon, K. (2016). Efektifitas ASEAN Way Sebagai Mekanisme Penyelesaian Konflik di Asia Tenggara. Studi Kasus: Konflik Preah Vihear dan Konflik Muslim Rohingya. (hal. 9)

¹¹ CABALLERO-ANTHONY, M. (1998). Mechanisms of Dispute Settlement: The ASEAN Experience. *Contemporary Southeast Asia*, 20(1), (Hal. 59). Retrieved from <http://www.jstor.org/stable/25798408>

mengembangkan kepekaan terhadap masalah politik, ekonomi dan keamanan.¹²

D. Hipotesa

Berdasarkan latar belakang dan landasan teoritik di atas dijelaskan bahwa telah terjadi pelanggaran Hak Asasi Manusia terhadap etnis Rohingya di negara bagian Rakhine, Myanmar. Diperlukan usaha ASEAN untuk mencegah atau menghentikan pelanggaran HAM tersebut, selain melalui pendekatan formal, juga melalui pendekatan informal sesuai dengan prinsip-prinsip ASEAN dalam *ASEAN Way*.

E. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana upaya-upaya yang dilakukan oleh ASEAN untuk menyelesaikan konflik yang terjadi di negara bagian Rakhine, Myanmar dengan menggunakan prinsip *ASEAN Way*.

F. Batasan Penelitian

Penelitian yang penulis lakukan adalah peran ASEAN dalam penyelesaian konflik Rohingya dengan penggunaan *ASEAN Way*. Dimulai sejak tahun 2012 ketika terjadi kerusuhan antar etnis di negara bagian Rakhine. Hingga pada tahun 2016 saat terjadi konflik antara etnis Rohingya dan militer Myanmar (*Tatmadaw*).

¹² *Ibid*

G. Metode Penelitian

1. Metode Analisis

Metode yang digunakan ialah metode deskriptif kualitatif. Data yang diperoleh dari penelitian dikumpulkan, diseleksi, dikategorisasi untuk kemudian dipaparkan secara deskriptif untuk memberikan gambaran fakta yang ada untuk menjawab pertanyaan yang ada pada rumusan masalah.

2. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini akan menggunakan metode pengumpulan data dengan studi. Studi dokumen didapatkan dari:

1. Studi kepustakaan yaitu dengan mempelajari buku, jurnal, laporan penelitian, dan riset.
2. Penelusuran melalui internet yaitu untuk mendapatkan data dan berbagai informasi terkait dengan penelitian.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dibutuhkan sebagai syarat mutlak dari suatu penelitian ilmiah, maka dari itu penulis membuat sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I berisi alasan latar belakang masalah, rumusan masalah, kerangka teori, hipotesis, batasan penelitian dan metode penelitian.

BAB II akan membahas sejarah konflik dari etnis Rohingya di Myanmar.

BAB III akan membahas mengenai dinamika politik ASEAN dalam konflik regional.

BAB IV akan membahas mengenai usaha-usaha ASEAN dalam penyelesaian konflik Rohingya dengan menggunakan *ASEAN Way*.

BAB V akan berisi rangkuman serta kesimpulan dari bab-bab yang telah dibahas dan penutup skripsi.

BAB II

SEJARAH KONFLIK ETNIS ROHINGYA DI MYANMAR

Dalam bab II ini akan dibahas mengenai sejarah awal terbentuknya etnis Rohingya di wilayah Rakhine, yang dulunya dikenal dengan nama Arakan. Akan dijelaskan bagaimana dimulainya perkembangan peradaban etnis Rohingya yang beragama Islam. Selanjutnya akan dibahas beragam bentuk diskriminasi yang diterima etnis Rohingya oleh Pemerintah Myanmar, serta bagaimana awal terjadinya konflik komunal antara etnis Rohingya dan kaum Buddhis Rakhine di tahun 2012.

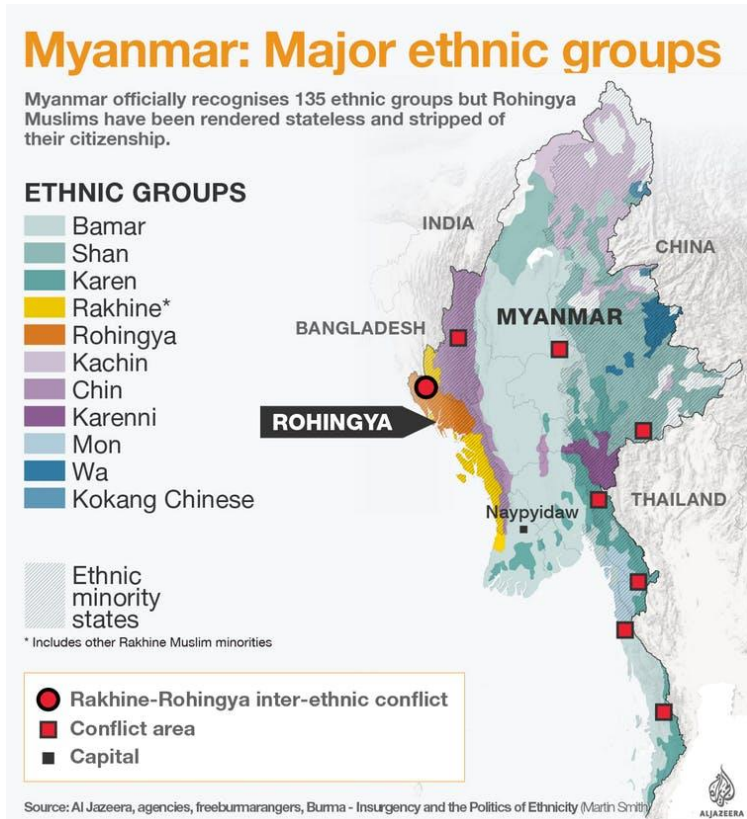
A. Sejarah Etnis Rohingya di Rakhine

Myanmar merupakan negara yang berada di wilayah Asia Tenggara dengan luas 676,578 km², berbatasan dengan India, Bangladesh, China, Laos, Thailand, Teluk Benggala dan Laut Andaman. Berdasarkan sensus tahun 2014, Myanmar didominasi dengan penganut agama Buddha yang berjumlah sekitar 87.9%, disusul dengan agama Kristen sekitar 6.2%, dan agama Islam sekitar 4.3%. Negara ini dikenal dengan negara yang multikultural. Sekitar 60% dari total populasi merupakan non-Burma, di antaranya ialah ras Shan, Chin, Kachin, Karen, Kayah, Mon, Pa-o, Palaung, Padaung, Dragon. Lahu, Akha, Wa, Rohingya (Arakan beragama Muslim), Rakhine (Arakan beragama Buddha) dan banyak ras pribumi lainnya.¹³

¹³ Tha, T. B. (2007). *A Short History of Rohingya and Kamans of Burma*. Hal. 3.

Rakhine yang dulu disebut dengan Arakan merupakan salah satu negara bagian dari Republik Persatuan Myanmar. Letaknya berada di sebelah barat Myanmar, berhadapan langsung dengan Teluk Benggala. Rakhine dihuni oleh dua etnis utama, yaitu etnis Rohingya dan etnis Rakhine (Magh). Etnis Rohingya dikenal dengan etnis yang beragama Islam, dan secara fisik dan bahasa mirip dengan orang-orang Bengali dari Bangladesh. Sedangkan etnis Rakhine dikenal dengan etnis yang mayoritas masyarakatnya beragama Buddha. Penduduk Etnis Rohingya umumnya terkonsentrasi di bagian utara Rakhine State.

Gambar 2. 1 Peta Persebaran Etnis-etnis di Myanmar



Sumber: aljazeera.com (diakses pada 2 April 2018)

Arakan yang terletak di pesisir pantai dahulunya merupakan wilayah yang terkenal bagi para pedagang. Selama masa Khilafah Harun al-Rashid (786-809), pedagang baik dari Arab maupun Turki biasa lalu-lalang di sini. Para pedagang Arab telah datang ke Burma sejak abad ke-9 dan beberapa sejarawan menegaskan bahwa mereka datang sejak abad ke-8.¹⁴ Pada era ini pedagang-pedagan Arab sangat aktif di wilayah perairan Asia Tenggara. Pengetahuan mendalam mereka dalam navigasi, ilmu lintang dan bujur, fenomena astronomi dan geografi negara-negara yang mereka telah kunjungi membuat mereka tak tertandingi dalam kegiatan perdagangan di Samudra Hindia selama berabad-abad.¹⁵

Dinasti Chandra yang menguasai wilayah Arakan juga menyambut baik kedatangan para pedagang Arab tersebut. Selain berdagang, para pedagang arab ini juga mulai menyebarkan agama Islam. Agama Islam mulai menyebar di Arakan melalui pedagang Arab yang menikahi wanita lokal dan kemudian menetap di Arakan. Sebagai hasil dari perkawinan ini, populasi Muslim di Arakan mulai tumbuh.¹⁶ Para pedagang yang menetap ini juga mulai meninggalkan pekerjaan mereka sebagai pelaut dan beralih ke bidang pertanian.

¹⁴ Mazhar, M. S., & Goraya, N. (2016). *Plight Of Rohingya Muslims*, Hal. 29.

¹⁵ Alam, M. A. (1999). *A Short Historical Background of Arakan*, Hal. 7.

¹⁶ Tan, A. T. (2009). State terrorism in Arakan. Dalam *A Handbook of Terrorism and Insurgency in Southeast Asia* (hal. 327). Massachusetts: Edward Edgar Publishing. Inc.

Sedangkan untuk istilah ‘Rohingya’ sendiri masih menjadi perdebatan. Sejarahwan Rohingya Khalilur Rahman menyatakan bahwa istilah Rohingya berasal dari bahasa Arab ‘Raham’ yang berarti rahmat atau belas kasihan. Ia berspekulasi bahwa Muslim yang tiba awal di Arakan merupakan pedagang Arab yang kapalnya terdampar dan terancam hukuman mati oleh Raja Arakan. Mereka lalu meminta ampun seraya meneriakkan kata ‘Rahma’. Oleh karena itu mereka dipanggil dengan sebutan ‘Raham’. Secara bertahap, istilah Raham berganti menjadi Rhohang dan akhirnya menjadi Rohingya.¹⁷ Sementara itu mantan Presiden dan Sekretaris Konferensi Muslim Arakan, Jahiruddin Ahmed dan Nazir Ahmed memiliki argumen berbeda. Mereka berargumen bahwa kapal yang terdampar ialah milik Muslim Thambu Kya yang tinggal di pesisir pantai Arakan. Kaum muslim inilah yang merupakan etnis Rohingya sebenarnya, dan mereka adalah keturunan penduduk Ruha di Afghanistan.¹⁸

Selain memiliki garis keturunan dari bangsa Arab, etnis Rohingya juga memiliki garis keturunan dari bangsa Moor, Pathan, Moghul, Asia Tengah, Bengal, dan beberapa bangsa Indo-Mongoloid. Karena memiliki campuran dari banyak jenis suku, penampilan fisik mereka berbeda dengan etnis Rakhine dan Burma, seperti tulang pipi mereka yang tidak menonjol dan mata yang tidak terlalu sempit. Hidung etnis Rohingya tidak pesek, kulit yang lebih gelap dan mereka sedikit lebih tinggi daripada etnis Rakhine Magh. Rohingya di Arakan juga masih membawa tradisi Arab seperti penggunaan nama, kepercayaan, pakaian, musik dan adat istiadat. Hal ini menunjukkan bahwa etnis Rohingya merupakan etnis yang telah lama mendiami wilayah Rakhine. Mereka bukanlah etnis

¹⁷ Leider, J. (2012). On the term “Rohingya”. *Rohingya - A historical and Linguistic Note*, (hal. 1).

¹⁸ *Ibid* (Hal. 2)

yang baru muncul, melainkan etnis pribumi di negara tersebut.¹⁹

Abad ke-14, kebudayaan Islam terus berkembang di wilayah Arakan, terutama saat Arakan dikuasai oleh kerajaan Mrauk-U. Pada tahun 1429 wilayah Arakan berhasil direbut dari bangsa Burma oleh Raja Naramekhla dengan bantuan Kerajaan Bengal. Meskipun Raja Naramekhla dan ahli warisnya menganut agama Buddha, ia tetap mempertahankan kebudayaan Islam di Arakan. Atas pengakuan kerajaannya, raja-raja kerajaan Mrauk-U menerima gelar-gelar Islam, serta melegalkan penggunaan koin emas dinar dari kerajaan Bengal. Selain itu, banyak umat muslim juga mengisi jabatan-jabatan tinggi di pemerintahan kerajaan.²⁰ Dalam periode tahun 1430 hingga 1784 Arakan yang dihuni etnis Rohingya menjadi wilayah Islam yang kuat.

Sampai pada abad ke-18, Kerajaan ini mulai mengalami kemunduran. Hingga pada tahun 1784, 30.000 pasukan dari raja Burma Bodawpaya berhasil menaklukkan Arakan. Jatuhnya kerajaan Mrauk-U mengawali penderitaan etnis Rohingya di Arakan. Kerajaan Burma yang menganut agama Buddha tersebut menghancurkan masjid, kuil, seminari, perpustakaan, dan berbagai peninggalan kerajaan sebelumnya.²¹ Perlakuan diskriminatif juga dilakukan Raja Bodawpaya terhadap muslim Rohingya. Dimulai dengan menghilangkan berbagai infrastruktur keislaman antara lain menghancurkan masjid dan mengalihkan fungsinya menjadi

¹⁹ (Alam, 1999) Op.cit., (hal. 9)

²⁰ Yegar, M. (2002). Muslim Settlement in Arakan. Dalam *Between Integration and Secession* (hal. 24). Oxford: Lexington Books.

²¹ (Alam, 1999) Op.cit., (hal. 22).

pagoda atau mengubah madrasah menjadi Kyang (lembaga keagamaan kaum Buddha).²²

Kondisi etnis Rohingya semakin terpuruk ketika Burma secara *de jure* memperoleh kemerdekaan dari Inggris pada tahun 1948. Proses kemerdekaan dimulai saat Jendral Aung San dan perwakilan dari berbagai etnis di Burma sepakat menandatangani perjanjian penyatuan Burma tanggal 12 September 1947.²³ Perjanjian ini menyepakati untuk merebut kemerdekaan dari koloni Inggris dan membentuk Burma menjadi negara federal yang terdiri dari beberapa negara bagian.

Pada saat kemerdekaan Myanmar tiba, tidak ada perwakilan dari etnis Rohingya yang diundang. Berbeda dengan etnis lain yang berhak mendirikan negara bagian sendiri, etnis Rohingya kehilangan hak dan wilayah Arakan diserahkan kepada etnis Rakhine yang memiliki populasi kurang dari 10% di wilayah tersebut.²⁴ Pada saat inilah diskriminasi pemerintah Myanmar terhadap etnis Rohingya dimulai.

B. Diskriminasi Myanmar Terhadap Etnis Rohingya

Pada awal kemerdekaan Burma tepatnya pada era kepemimpinan Perdana Menteri U Nu, etnis Rohingya saat itu diakui sebagai warga negara yang sah. Deklarasi pemerintahan parlementer Burma era kepemimpinan Perdana Menteri U Nu dijelaskan:

²² Hartimah, T. (2010). *Rekam Jejak Muslim Rohingya di Myanmar*, (hal. 88).

²³ *Ibid.* (Hal. 89)

²⁴ *Ibid.*

*“The people living in Maungdaw and Buthidaung regions are our national brethren. They are called Rohingya. They are on the same par in the status of nationality with Kachin, Kayah, Karen, Mon, Rakhine and Shan. They are one of the ethnic races of Burma.”*²⁵

Deklarasi ini dengan jelas menyebut etnis Rohingya dan mengakui etnis ini sebagai salah satu suku asli etnis Burma.

Selain itu, terjadi juga penolakan dari anggota parlemen Burma yang ingin memisahkan kawasan permukiman etnis Rohingya dari negara bagian Arakan. Perdana Menteri U Nu akhirnya memutuskan untuk membentuk wilayah administrasi bernama Mayu Frontier District. Distrik ini berdiri sejak tahun 1961 hingga 1964, terdiri dari Kotapraja Maungdaw, Buthidaung, dan sebagian wilayah Rathedaung. Distrik ini memisahkan ketiga Kotapraja yang merupakan permukiman etnis Rohingya dari wilayah Arakan.

Situasi ini tidak bertahan lama. Pada bulan Maret 1962 selang setelah 2 tahun terpilih sebagai Perdana Menteri, pemerintahan U Nu digulingkan melalui kudeta berdarah oleh Jendral Ne Win. Ne Win yang sebelumnya pernah menjabat sebagai PM Burma menangkap U Nu beserta para menteri kabinetnya.²⁶ Kudeta ini disebabkan oleh ketidakpercayaan dari pihak militer Burma (*Tatmadaw*) terhadap sistem federal

²⁵ Ullah, A. (2017, Mei 24). *The Concept of Citizenship in Burma and the Status of Rohingyas*. Diambil kembali dari The Stateless Rohingya: <http://www.thestateless.com/2017/05/the-concept-of-citizenship-in-burma-and-the-status-of-rohingyas.html>

²⁶ The Telegraph. (2002, Desember 6). *General Ne Win*. Diambil kembali dari The Telegraph: <https://www.telegraph.co.uk/news/obituaries/1415295/General-Ne-Win.html>

yang dianut Burma. Berbagai suara yang diwakili oleh parlemen dipandang sebagai penyebab ketidakstabilan dan dapat meningkatkan perselisihan antar etnis yang akan meruntuhkan persatuan negara Burma.²⁷ Pascakudeta tahun 1962, Burma beralih dari negara demokratis menjadi negara sosialis satu partai yaitu *Burma Socialist Programme Party* (BSPP). Union Parlement yang merupakan badan legislatif dua kamar Myanmar juga dibubarkan dan digantikan dengan *Union Revolutionary Council (URC)* yaitu sistem satu kamar yang semua pejabatnya berlatar belakang militer. Dengan ini secara tidak langsung semua kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif berada di tangan *Tatmadaw*.

Berjalannya rezim militer terhadap pemerintahan Burma langsung memberikan dampak terhadap kehidupan etnis Rohingya. Pada Februari 1963, URC menasionalisasi seluruh bank dan perusahaan bisnis di seluruh negara. Sementara itu, di Arakan sebagian besar perusahaan besar merupakan milik kaum Muslim. Di wilayah Arakan hingga toko-toko kecil milik kaum Muslim tidak terhindar dari program ini.²⁸

Pembentukan partai tunggal BSPP juga berdampak bagi etnis Rohingya. Pada wilayah Arakan, hanya etnis Rakhine Magh yang diikutsertakan dalam partai BSPP. Pada 1 Februari 1964, URC mengakhiri status khusus wilayah administrasi *Mayu Frontier District* dan berada di bawah tanggung jawab Kementerian Dalam Negeri. Puncaknya pada tahun 1972, konstitusi menggabungkan wilayah *Mayu Frontier District* ke negara bagian Arakan. Selanjutnya negara bagian Arakan berganti nama menjadi negara bagian Rakhine, dan

²⁷ Thwin, M. A., & Thwin, M. A. (2013). Reconstruction and Nation-Building. Dalam *A History of Myanmar since Ancient Times: Traditions and Transformations* (hal. 247). London: Reaktion Books Ltd.

²⁸ (Alam, 1999). Op.cit., (hal. 26)

memberikan 100% kekuasaannya kepada etnis Rakhine dan etnis Burma penganut Budha.²⁹

Pada tahun 1977, *Tatmadaw* dan pihak imigrasi Burma melakukan sebuah operasi militer bernama *Operation Nagamin (Dragon King Operation)* yang bertujuan untuk menyaring warga asing. Akibat dari operasi tersebut, lebih dari 200.000 jiwa etnis Rohingya diusir dan melarikan diri ke Bangladesh. Otoritas Burma mengklaim bahwa etnis Rohingya merupakan kaum ilegal di negara Burma.³⁰ Klaim ini berlanjut dengan dikeluarkannya Hukum Kewarganegaraan Burma tahun 1982. Singkatnya, warganegara menurut Hukum Kewarganegaraan Burma tahun 1982 dapat didefinisikan sebagai;

*Warga negara seperti Kachin, Kayah, Karen, Chin, Burman, Mon, Rakhine atau Shan dan kelompok etnis lainnya sebagaimana telah menetap di salah satu wilayah yang termasuk dalam Negara sebagai rumah permanen mereka dari sebelum tahun 1823 adalah warga negara Burma. Dewan Negara dapat memutuskan apakah suatu kelompok etnis merupakan warga negara atau bukan.*³¹

Pemerintah Burma hanya mengakui sebanyak 135 etnis sebagai ras pribumi dan berhak mendapatkan kewarganegaraan, sementara etnis Rohingya tidak termasuk dalam daftar tersebut. Pemerintah Burma juga tidak mengakui sejarah awal munculnya etnis Rohingya yang telah mendiami

²⁹ *Ibid.*

³⁰ Human Rights Watch. (2000, Mei 29). *Burmese Refugees in Bangladesh*. Diambil kembali dari Human Rights Watch: <https://www.hrw.org/report/2000/05/01/burmese-refugees-bangladesh/still-no-durable-solution>

³¹ Ibrahim, A. (2016). *From Independence to Democracy (1948-2010)*. Dalam *The Rohingyas, Inside Myanmar's Hidden Genocide* (hal. 51). New York: Oxford University Press.

wilayah Arakan sejak ratusan tahun lalu. Pemerintah Burma sebaliknya menganggap etnis Rohingya sebagai kaum imigran dari Bangladesh yang mendiami wilayah Arakan secara ilegal, sejak tibanya Kemaharajaan Britania dan melalui peperangan di wilayah tersebut. Keputusan ini mengakibatkan etnis Rohingya kehilangan hak kewarganegaraannya dan menjadi warga tanpa negara (*stateless*).

Kehilangan kewarganegaraan menghasilkan serangkaian diskriminasi terhadap etnis Rohingya, diantaranya:

1. Pemandahan Paksa

Etnis Rohingya dipaksa untuk pindah dan disita harta kekayaannya lalu didistribusikan kepada komunitas Buddhis. Serangkaian kerusuhan yang melibatkan kaum fundamentalis Buddhis juga mengakibatkan ribuan jiwa kehilangan tempat tinggal.

2. Diskriminasi dalam Bidang Ekonomi

Pada bidang ekonomi, etnis Rohingya tidak diberikan izin untuk mendirikan usaha, sedangkan pihak Junta juga meminta pajak yang tinggi bagi etnis Rohingya yang mayoritas bekerja sebagai petani. Dampaknya banyak lahan pertanian milik etnis Rohingya yang disita secara paksa akibat tidak dapat membayar pajak. Petani, buruh pemotong kayu, dan petani agribisnis juga diharuskan menjual barang-barangnya kepada agen yang ditunjuk dari pemerintah dengan harga yang telah ditentukan.³²

3. Larangan Perjalanan

³² (Hartimah, 2010). Op.cit., (hal. 90)

Etnis Rohingya di Arakan dibatasi pergerakannya di luar wilayah tersebut. Untuk pergi ke Ibukota Arakan; dari Akyab atau Yangon, mereka membutuhkan kartu perjalanan khusus. Kartu tersebut tidak mudah untuk didapatkan dan sebagian besar permintaan terhadap kartu tersebut ditolak. Menurut laporan Amnesty Internasional, etnis Rohingya yang ingin melakukan perjalanan ke kota lain atau bahkan desa lain diharuskan untuk membayar sejumlah uang dan resiko untuk digeledah di pos-pos pemeriksaan, di mana petugas Board Guard Police (BGP) memandang mereka layaknya "ATM berjalan".³³

4. Keterbatasan Pendidikan

Setelah mengenyam sekolah menengah di Burma, para siswa harus memiliki kartu identitas nasional. Sementara anak-anak etnis Rohingya tidak memiliki kartu tersebut.

5. Keterbatasan Pekerjaan

Karena tidak memiliki hak untuk mendapatkan kartu identitas nasional, mereka memiliki sedikit kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan di perkotaan. Walaupun mendapat kesempatan, mereka kurang memiliki kompetensi akibat minimnya pendidikan.

6. Kesulitan Menikah

Etnis Rohingya harus membayar pajak sekitar 300.000 Kyat untuk menikah. Mereka juga dilarang menikah dan

³³ Cochrane, L. (2017, November 21). *Myanmar's discrimination against Rohingya Muslims is 'apartheid': Amnesty International*. Diambil kembali dari ABC News: <http://www.abc.net.au/news/2017-11-21/myanmar-discrimination-against-rohingya-apartheid-amnesty-report/9177590>

memiliki keturunan tanpa izin pemerintah. Pasangan menikah seringkali harus menunggu waktu sekitar dua tahun untuk mendapatkan izin tersebut. Selain itu etnis Rohingya juga dibatasi dengan peraturan maksimal hanya memiliki dua anak.³⁴ Peraturan ini dilakukan demi mengurangi jumlah pertumbuhan penduduk etnis Rohingya.

7. Diskriminasi terhadap Kultur dan Agama

Kultur muslim dipandang agama asing dan ancaman bagi kultur Buddha. Berkumpul dan beribadah bersama bagi etnis Rohingya telah dilarang sejak kudeta 1962. Banyak tempat-tempat ibadah dan madrasah kaum muslim diubah menjadi kuil Buddha. Terjadi juga beberapa kali penyerangan terhadap masjid dan madrasah, namun kemanan negara tidak mencegah kejadian tersebut, bahkan mereka ikut berpartisipasi pada perusakan tersebut.³⁵

8. Kerja Paksa

Pasukan kemanan Nay-Sat Kut-kwey ye (NaSaKa) yang terdiri dari polisi, badan imigrasi, badan intelijen, dan lembaga anti huru-hara telah memaksa banyak warga etnis Rohingya membayar sejumlah uang untuk menghindari kerja paksa seperti pekerjaan konstruksi, pekerjaan pertanian, *portering*, atau melayani sebagai penjaga.³⁶ Pasukan keamanan tersebut mengancam akan membunuh mereka jika mereka menolak mematuhi peraturan tersebut.

³⁴ Human Right Watch. (2013, Mei 28). *Burma: Revoke 'Two-Child Policy' For Rohingya*. Diambil kembali dari Human Right Watch: <https://www.hrw.org/news/2013/05/28/burma-revoke-two-child-policy-rohingya>

³⁵ Lindblom, A. (2015). *Rohingya Under Military Rule. Persecutiin of the Rohingya Muslims*, (Hal. 11).

³⁶ *Ibid*

Sejak hilangnya status warga negara bagi etnis Rohingya, telah beberapa kali Pemerintah Myanmar melakukan upaya pengusiran. Salah satunya ialah dengan cara genosida.

Upaya genosida pertama kali dilakukan pada *Operation Nagamin*, atau dikenal juga dengan nama *Operation King Dragon*. Dilancarkan pada Maret 1978, operasi ini bertujuan untuk meneliti setiap individu di dalam negara sebagai warga negara atau diduga sebagai imigran gelap.³⁷ Operasi ini merupakan peristiwa kelam bagi etnis Rohingya di Arakan Utara dimana baik laki-laki maupun perempuan, tua ataupun muda disiksa, ditangkap paksa, diperkosa, dan dibunuh. Demi menghindari persekusi yang dilakukan pemerintah Burma, Juli 1978 terjadi perpindahan massal yang dilakukan etnis Rohingya dari wilayah Arakan menuju negara Bangladesh.

Menghadapi jumlah pengungsi yang terus bertambah, pemerintah Bangladesh di satu sisi memulai negosiasi bilateral dengan pemerintah Burma, dan di sisi lain pemerintah Bangladesh juga meminta bantuan kemanusiaan dari komunitas internasional. Hasil dari penggalangan dana kemanusiaan internasional tersebut disalurkan untuk membantu para pengungsi yang ditempatkan di 11 kamp pengungsian.³⁸ Pihak Bangladesh memperkirakan lebih dari 250.000 jiwa pengungsi telah ditampung di negaranya, sementara pihak Burma memperkirakan angka tersebut

³⁷ Ahmed, A. (2012, Januari 30). *The Rohingya: Myanmar's Outcasts*. Diambil kembali dari Al Jazeera: <https://www.aljazeera.com/indepth/opinion/2012/01/201212710543198527.html>

³⁸ Abrar, C. (2003, Juni 22). *Repatriation of Rohingya Refugees*. Diambil kembali dari Myanmar Library: REPATRIATION OF ROHINGYA REFUGEES

berjumlah 150.000 jiwa.³⁹ Walaupun telah dibantu dengan bantuan kemanusiaan, *United Nations High Commissioner for Refugees* (UNHCR) melaporkan pada akhir Januari 1979 jumlah kematian pengungsi di Bangladesh telah lebih dari 10.000 jiwa.

Hingga pada Juli 1979, atas desakan kuat dari PBB, UNHCR, Pemerintah dari Arab Saudi dan India, serta *Muslim World League*, perjanjian bilateral ditandatangani oleh pemerintah Burma dan Bangladesh untuk menyetujui pemulangan pengungsi yang berasal dari wilayah Arakan. Hingga akhir tahun 1979, tercatat lebih dari 180.000 pengungsi telah kembali ke Burma.⁴⁰

Upaya pengusiran selanjutnya yang dilakukan pemerintah Myanmar terjadi pada tahun 1991. Sebuah operasi militer yang kali ini dinamakan *Operation Pyi Thaya* atau dikenal juga dengan nama *Operation Clean and Beautiful Nation* dilakukan kembali oleh angkatan bersenjata Myanmar (Tatmadaw). Sama dengan operasi sebelumnya, Operasi *Pyi Thaya* ini bertujuan untuk mengusir imigran ilegal dari negara Myanmar.

Operasi ini juga dijalankan pemerintah Myanmar dengan tujuan melawan sebuah organisasi militan bernama *Rohingya Solidarity Organisation* (RSO).⁴¹ Organisasi yang

³⁹ Skutsch, C. (2005). Arakanese. Dalam *Encyclopedia of the World's Minorities* (hal. 128). New York: Routledge.

⁴⁰ UNCHR. (2000). Dalam *The State of the World's Refugees, 2000: Fifty Years of Humanitarian Action* (hal. 75). New York: Oxford University Press.

⁴¹ Lintner, B. (2003, Juli). *Bangladesh: Extremist Islamist Consolidation*. Diambil kembali dari South Asia Terrorism Portal: <http://www.satp.org/satporgtp/publication/faultlines/volume14/Article1.htm>

berdiri pada tahun 1982 ini merupakan sebuah gerakan militan dari orang-orang Rohingya di wilayah Bangladesh dan wilayah perbatasan antara Bangladesh dan Myanmar. RSO saat itu didukung oleh beberapa organisasi gerakan Islam lainnya seperti, *Jamaat-e-Islami* (JEI) dari Bangladesh dan Pakistan, *Hezb-e-Islami* (HEL) dari Afganistan, *Hizb-ul-Mujahideen* (HM) dari Jammu and Kashmir, dan Angkatan Belia Islam Malaysia (ABIM) dari Malaysia.⁴² Pergerakan RSO yang terus berkembang sejak akhir 1980-an mendorong pemerintah Myanmar untuk melakukan operasi militer demi menumpas gerakan-gerakan yang dianggap melawan pemerintah ini.

Pada operasi militer ini, etnis Rohingya di Rakhine Utara kembali mendapatkan perlakuan buruk dari pasukan militer *Tatmadaw*. Selama berlakunya operasi militer ini, diskriminasi, kekerasan, dan penerapan praktik kerja paksa dilakukan oleh otoritas Myanmar. Demi menghindari penindasan tersebut, etnis Rohingya kembali berbondong-bondong pindah menuju Bangladesh. Tercatat pada bulan Maret 1992, sekitar 260.000 jiwa pengungsi Rohingya menempati kamp pengungsian di kota Cox's Bazar, Bangladesh.⁴³

Pemerintah Bangladesh tidak menampung pengungsi Rohingya dalam waktu yang lama. Pada tanggal 29 April 1992, pemerintah Myanmar dan Bangladesh memulai program repatriasi pengungsi Rohingya dengan menandatangani *Memorandum of Understanding* (MOU). MOU tersebut berisikan persetujuan Myanmar menerima kembali para pengungsi Rohingya dan membangun tempat tinggal untuk

⁴² *Ibid*

⁴³ Resource Information Center. (1999, Desember 7). *Burma: Information on Rohingya Refugees*. Diambil kembali dari Refworld: <http://www.refworld.org/docid/3ae6a6a41c.html>

etnis Rohingya sepulangnya di Myanmar.⁴⁴ Sepanjang tahun 1992 hingga 1997, program repatriasi dengan bantuan UNHCR ini telah berhasil mengembalikan pengungsi Rohingya kembali ke Myanmar sekitar 230.000 jiwa. Program ini akhirnya berhenti total pada Juli 2005 saat pemerintah Myanmar menolak untuk melanjutkan program tersebut dan menutup beberapa upaya pemulangan.⁴⁵

Peristiwa persekusi terhadap etnis Rohingya di Myanmar selanjutnya terjadi pada tahun 2012. Sebuah konflik komunal yang melibatkan dua pihak yaitu kaum Buddhis Rakhine dan etnis Rohingya telah mengakibatkan puluhan korban jiwa dari kedua belah pihak, dan terlantarnya ratusan ribu jiwa.

Konflik ini berawal pada Juni 2012 setelah tersebarnya berita melalui surat kabar milik pemerintah Myanmar yaitu *The New Light of Myanmar*. Surat kabar tersebut pada edisi 4 Juni 2012 memberitakan bahwa telah terjadi pemerkosaan serta pembunuhan terhadap seorang gadis Buddhis yang dilakukan oleh tiga orang pemuda bengali Muslim pada tanggal 28 Mei 2012.⁴⁶ Kabar berita ini disusul dengan kemarahan warga kaum Buddhis Rakhine. Sejumlah massa Buddhis Rakhine membalas peristiwa pembunuhan tersebut dengan menyerang bus berisikan kaum muslim di

⁴⁴Abrar, C. (2003, Juni 22). *Repatriation of Rohingya Refugees*. Diambil kembali dari Burmalibrary: <http://www.burmalibrary.org/docs/Abrar-repatriation.htm>

⁴⁵Lwin, E. E., & McLaughlin, T. (2014, September 6). *Government rejects repatriation reports*. Diambil kembali dari Myanmar Times: <https://www.mmtimes.com/national-news/11561-govt-rejects-rohingya-repatriation-reports.html>

⁴⁶Waluyo, T. J. (2013). Konflik Tak Seimbang Etnis Rohingya dan Etnis Rakhine di Myanmar. *Jurnal Transnasional Vol. 4 No. 2*, (Hal. 841)

dekat kota Taungup. Serangan balas dendam ini mengakibatkan 10 kaum muslim tewas.

Pasca kejadian tersebut, keadaan di wilayah Rakhine semakin memanas. Etnis Rohingya yang tidak terima dengan pembunuhan tersebut melancarkan aksi balasan. Pada tanggal 8 Juni 2012, setelah melaksanakan salat Jumat, ratusan warga etnis Rohingya mulai merusak rumah-rumah kaum Buddha Rakhine dengan membakar dan melemparkan batu.⁴⁷ Meskipun pemerintah Myanmar telah menyatakan keadaan darurat hingga dikerahkannya angkatan bersenjata di wilayah Rakhine, konflik komunal ini terus berlanjut. Berdasarkan laporan dari Menteri Luar Negeri Myanmar pada 21 Agustus 2012, akibat dari konflik di bulan Juni, 88 orang tewas, yang di antaranya 31 warga dari etnis Rakhine dan 57 warga Muslim Bengali. Selain itu, rumah-rumah dan bangunan keagamaan dari kedua komunitas juga habis terbakar. Data dari Amnesti Internasional juga menyebutkan lebih dari 140.000 jiwa menjadi pengungsi internal dan menempati tempat penampungan sementara di negara bagian Rakhine.

Beberapa konflik yang melibatkan etnis Rohingya tetap terjadi di tahun 2013 dan 2014. Sentimen anti-Muslim juga semakin kuat dengan dibentuknya sebuah gerakan bernama “969 Movement”. Gerakan yang dibentuk oleh kaum Buddhis Myanmar ini menggambarkan Muslim di Rakhine sebagai ancaman terhadap agama Buddha. Kondisi yang tidak kunjung kondusif ini menyebabkan etnis Rohingya terpaksa harus mencari tempat tinggal lain.

⁴⁷ Reuters. (2012 , Juni 9). *Four killed as Rohingya Muslims riot in Myanmar: government*. Diambil kembali dari REUTERS: <https://www.reuters.com/article/us-myanmar-violence/four-killed-as-rohingya-muslims-riot-in-myanmar-government-idUSBRE85714E20120608>

Pada tahun 2015, terjadi krisis pengungsi Rohingya, di mana menurut catatan UNHCR antara tahun 2012 hingga 2015 ratusan ribu etnis Rohingya telah mengarungi Selat Malaka dan Laut Andaman demi mencari suaka di negara-negara sekitar. Negara yang dituju oleh para pengungsi tersebut antara lain Bangladesh, Malaysia, Indonesia, dan Thailand. Para pengungsi tersebut datang dengan menggunakan perahu-perahu berukuran kecil yang menampung hingga ratusan orang di dalamnya.

Gambar 2. 2 Para Pengungsi yang Tiba di Perairan Thailand



Sumber: CNN.com (diunduh pada 20 April 2018)

Indonesia, Malaysia dan Thailand merespon negatif kedatangan para pengungsi tersebut. Otoritas Indonesia mengakui bahwa telah mendorong kembali perahu pengungsi yang tiba pada tanggal 11 Mei setelah menyediakan bantuan makanan dan air kepada pengungsi di kapal. Respon yang sama juga dilakukan oleh Malaysia. Melalui Wakil Menteri Dalam Negeri Wan Junaidi Tuanku Jaafar menyatakan akan mengembalikan perahu pengungsi dan mendeportasi mereka

yang mendarat. Sementara pejabat senior Thailand mengatakan bahwa pemerintahnya telah mengadopsi kebijakan untuk mendorong kapal-kapal dari pantai Thailand setelah menyediakan bahan bakar, makanan, dan air bagi para pengungsi di kapal.⁴⁸

⁴⁸ Human Rights Watch. (2015 , Mei 14). *Southeast Asia: End Rohingya Boat Pushbacks*. Diambil kembali dari Human Rights Watch: <https://www.hrw.org/news/2015/05/14/southeast-asia-end-rohingya-boat-pushbacks>

BAB III

DINAMIKA POLITIK ASEAN DALAM KONFLIK REGIONAL

Pada bab III ini akan dibahas mengenai sejarah dari awal terbentuknya organisasi *international governmental organisation* di regional Asia Tenggara bernama ASEAN. Selain itu akan dibahas juga dinamika politik ASEAN dalam mengatasi konflik yang terjadi di negara-negara anggotanya dengan menggunakan ASEAN Way. Tiga konflik yang akan dibahas diantaranya sengketa wilayah Sabah antara Malaysia dan Filipina, sengketa kuil Preah Vihear antara Kamboja dan Myanmar, dan Intervensi ASEAN saat krisis Topan Nargis di Myanmar.

A. Sejarah ASEAN

Association of Southeast Asian Nations atau biasa disingkat dengan ASEAN merupakan *intergovernmental international organization*. Organisasi ini berdiri pada tanggal 8 Agustus 1967 dicetus oleh lima negara yang berada di kawasan Asia Tenggara, Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand.

Gambar 3. 1 Lambang ASEAN



Sumber: asean.org (diakses pada 20 Februari 2018)

Lahirnya organisasi regional ini dimotivasi oleh adanya kesamaan nasib dari seluruh negara pendiri ASEAN. Seluruh negara anggota pendiri ASEAN kecuali Thailand baru mendapatkan kemerdekaannya setelah berabad-abad merasakan penjajahan. Indonesia merasakan dampak penjajahan kolonial Belanda selama sekitar 350 tahun, Malaysia dan Singapura dijajah oleh Britania Raya dari abad ke-18 hingga abad ke-20, sementara Filipina merupakan wilayah koloni dari Kerajaan Spanyol selama 265 tahun (1569-1821). Menurut Rodolfo Severino Jr yang merupakan Sekretaris Jenderal ASEAN tahun 1998 sampai 2002 mengungkapkan bahwa pembentukan ASEAN yang merupakan organisasi regional di Asia Tenggara dapat menyediakan mekanisme swadaya bagi negara-negara yang baru merdeka yang memungkinkan mereka untuk berkonsentrasi pada pembangunan bangsa dan pembangunan ekonomi.

Meskipun memiliki kesamaan nasib antar negara pencetus ASEAN, organisasi ini berdiri pada saat-saat yang

mengkhawatirkan. Dalam waktu bersamaan, hampir setiap negara dari kelima negara anggota pertama ASEAN sedang saling berseteru. Malaysia dan Singapura yang mengalami ketegangan rasial baru saja berpisah. Indonesia yang telah mengalami kesengsaraan akibat kudeta berdarah komunis yang gagal, baru saja mengakhiri perang tidak resminya melawan Malaysia dan Singapura yang disebut dengan Konfrontasi Indonesia-Malaysia. Filipina mengaku memiliki hak atas sebagian wilayah di bagian timur Malaysia yang disebut Sabah. Sementara gerakan *proto-irredentist* yang terjadi di wilayah perbatasan menodai hubungan antara Malaysia dan Thailand, juga antara Indonesia dan Filipina.⁴⁹

William Douglas dalam *World Affair* 1956 menunjukkan sikap pesimisnya dengan mengatkan bahwa Asia Tenggara, “berhadapan dengan masalah-masalah yang sangat memperhatikan. Kaya dalam sumber daya manusia maupun sumber daya alam dan menjadi incaran bagi mereka yang ingin membangun kemaharajaan Soviet, Asia Tenggara akan mengalami pergolakan dan kesusahan dalam waktu panjang.”⁵⁰ Charles Fisher bahkan menggambarkan kondisi Asia Tenggara saat itu sebagai “Balkan di Asia”, sambil meramalkan kemelut yang akan menimpa wilayah Asia Tenggara.⁵¹ Penggambaran Charles Fisher terhadap Asia Tenggara didasari pada beragamnya kondisi di wilayah ini, bahkan lebih beragam dibandingkan Balkan di Eropa. Wilayah Asia Tenggara ini cukup unik dikarenakan memiliki latar belakang agama, etnis, bahasa, budaya, dan pengalaman kolonial yang berbeda satu sama lainnya. Tentu akan sulit untuk menyatukan negara-negara ini dalam sebuah organisasi regional.

⁴⁹ Mahbubani, K., & Sng, J. (2017). Dalam *Keajaiban ASEAN - Penggerak Perdamaian* (hal. 5). Singapore: NUS Press.

⁵⁰ *Ibid* (Hal. 6)

⁵¹ *Ibid* (Hal. 7)

Gambar 3. 2 Penandatanganan Deklarasi Bangkok



Sumber: theglobal-review.com (diakses pada 20 Februari 2018)

Dalam kondisi tersebut, lima perwakilan dari negara-negara Asia Tenggara yang juga menjadi pelopor dari ASEAN, yaitu Menteri Luar Negeri Indonesia (Adam Malik), Wakil Perdana Menteri merangkap Menteri Pertahanan dan Menteri Pembangunan Nasional Malaysia (Tun Abdul Razak), Menteri Luar Negeri Filipina (Narciso Ramos), Menteri Luar Negeri Singapura (S. Rajaratnam), dan Menteri Luar Negeri Thailand (Thanat Khoman) menindaklanjuti Deklarasi Bersama dengan melakukan pertemuan dan penandatanganan Deklarasi ASEAN (The ASEAN Declaration) atau yang dikenal dengan Deklarasi Bangkok. Dengan ditandatanganinya Deklarasi Bangkok tersebut, suatu

organisasi kawasan yang diberi nama Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (Association of Southeast Asian Nations/ASEAN) telah resmi berdiri.⁵² Pada awalnya terbentuknya ASEAN, organisasi ini berfokus pada isu keamanan sebagai bentuk reaksi atas penyebaran pengaruh perang dingin di kawasan Asia Tenggara. Namun kini fokus ASEAN telah melebar ke masalah-masalah non-militer. Tujuan ASEAN saat ini ialah mempercepat pertumbuhan ekonomi, sosial, dan budaya regional melalui semangat memperkuat komunitas ASEAN; meningkatkan stabilitas dan perdamaian regional; meningkatkan kerjasama regional dalam bidang ekonomi, sosial, budaya, ilmu pengetahuan dan administrasi; meningkatkan kerjasama di bidang industri, pertanian, dan perdagangan; meningkatkan studi mengenai Asia Tenggara, menjalin hubungan baik dan kerjasama yang menguntungkan dengan organisasi internasional dan regional lainnya.⁵³

Meskipun awal berdirinya organisasi ini diprediksi secara pesimis, ASEAN terbukti telah bertahan hingga di usianya yang telah menginjak umur ke 50 tahun. Selama setengah abad tersebut, ASEAN berkembang dengan menjalankan berbagai agenda dalam bidang politik. Di antaranya *Zone of Peace, Freedom, and Neutrality Declaration* (ZOPFAN) pada tahun 1971. Lalu disepakatinya *Treaty of Amity and*

⁵² Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. (2015, Maret 17). *Sejarah dan Latar Pembentukan ASEAN*. Diambil kembali dari Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia: <https://www.kemlu.go.id/id/kebijakan/asean/Pages/Sejarah-dan-Latar-Pembentukan-ASEAN.aspx>

⁵³ Hennida, C. (2015). *Desain Rezim dan Organisasi Internasional*. Dalam *Rezim dan Organisasi Internasional* (hal. 43). Malang: Intrans Publishing.

Cooperation pada tahun 1976 yang berisikan prinsip-prinsip khusus Kerjasama di Asia Tenggara dan ketentuan-ketentuannya untuk penyelesaian sengketa regional dan untuk kerjasama regional demi mencapai perdamaian, persahabatan dan persahabatan di antara masyarakat Asia Tenggara. Prinsip-prinsip ini selanjutnya sering disebut dengan istilah '*ASEAN Way*'.

Kemajuan organisasi regional ini juga ditunjukkan dengan bertambahnya negara-negara yang bergabung, yaitu:⁵⁴

1. Brunei Darussalam resmi menjadi anggota ke-6 ASEAN pada tanggal 7 Januari 1984 dalam Sidang Khusus para Menteri Luar Negeri ASEAN di Jakarta, Indonesia.
2. Vietnam bergabung menjadi anggota ASEAN ke-7 pada pertemuan para Menteri Luar Negeri ASEAN ke-28 di Bandar Sri Begawan, Brunei Darussalam, 29 Juli 1995
3. Laos dan Myanmar resmi bergabung menjadi anggota ke-8 dan ke-9 pada pertemuan Menteri Luar Negeri ASEAN ke-30 di Subang Jaya, Malaysia, 23-28 Juli 1997
4. Kamboja bergabung menjadi anggota ASEAN ke-10 dalam upacara penerimaan pada tanggal 30 April 1991 di Hanoi.

Dengan bergabungnya menjadi anggota baru ASEAN berarti negara-negara tersebut wajib untuk berkomitmen mengikuti seluruh perjanjian, traktat, dan deklarasi di ASEAN. Dimulai dengan Deklarasi Bangkok yang berisikan tujuan awal pembentukan organisasi ASEAN.

⁵⁴ *Ibid*

B. ASEAN Way dalam Penyelesaian Konflik di Asia Tenggara

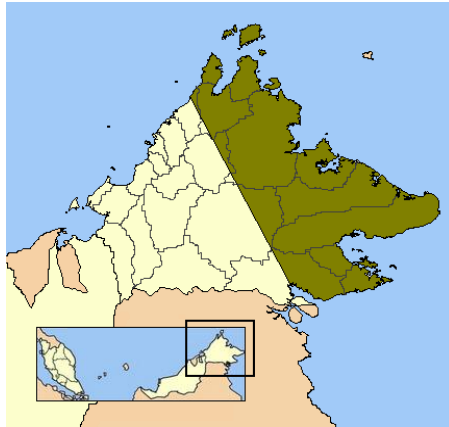
Selama 50 tahun berdiri, ASEAN telah dihadapkan oleh berbagai permasalahan baik permasalahan domestik suatu negara anggotanya maupun permasalahan yang melibatkan dua negara anggotanya atau lebih. Berikut ini adalah macam-macam permasalahan di regional Asia Tenggara dan bagaimana ASEAN menghadapinya dengan menggunakan prinsip-prinsip *ASEAN Way*.

1. Sengketa Sabah Antara Filipina dan Malaysia

Sejak awal terbentuk, ASEAN langsung dihadapkan oleh sengketa yang melibatkan dua negara anggotanya, yaitu Malaysia dan Filipina. Filipina mengklaim sebagian wilayah bagian timur dari Borneo Utara yang kini disebut dengan Sabah.

Pasca menjadi wilayah koloni Inggris, Sabah sempat kemerdekaan pada 31 August 1963 dan membentuk pemerintahan sendiri. Namun setelah diadakan diskusi antar perwakilan komunitas muslim, non-muslim, dan tionghoa, Sabah menyetujui untuk bergabung dengan Federasi Malaysia.

Gambar 3. 3 Peta Wilayah Filipina di Sabah



Sumber: Wikiwand.com (diakses pada 1 Maret 2018)

Sengketa ini diakibatkan oleh perbedaan status mengenai wilayah Borneo Utara antara Filipina dan Malaysia. Dalam perjanjian antara Kesultanan Sulu dan Sindikat Pedagang Inggris tertulis:

*sudah kuredhai **pajakan** dengan keredhaan dan kesukaan kita sendiri kepada tuan Gustavus Baron von Overbeck yang tinggal dalam negeri Hong Kong dan kepada Alfred Dent Esquire yang tinggal dalam negeri London... sampai selama-lamanya sekalian perintah dan kuasa yang kita punya yang takluk kepada kita di tanah besar Pulau Borneo dari Sungai Pandasan di sebelah barat sampai sepanjang semua tanah di pantai sebelah timur sejauh Sungai Sibuku di sebelah selatan⁵⁵*

⁵⁵ Aziz, H. (2016). Perjanjian Sulu-Overbeck 1878. *Tuntutan Kesultanan Sulu Terhadap Sabah*, 284.

Dari perjanjian ini terdapat perbedaan tafsiran antara Malaysia dan Filipina. Malaysia mengklaim bahwa kata *pajakan* dapat diartikan sebagai “hibah”. Sementara kata *pajakan* sendiri diartikan sebagai “sewa” oleh Filipina. Akibatnya terjadi beberapa kali perselisihan yang diakibatkan oleh sengketa wilayah ini.

Isu klaim Filipina atas wilayah Sabah telah muncul sejak tahun 1961, namun kemudian kembali diperbincangkan ketika Ferdinand Marcos terpilih sebagai Presiden Filipina. Isu ini memanas kembali ketika Maret 1968 tersebar berita dari surat kabar Manila bahwa Filipina melakukan latihan militer rahasia di Pulau Corregidor. Pasca pemberitaan ini, hubungan antar kedua negara tersebut terus memburuk hingga sempat terjadi pemutusan hubungan diplomatik pada tahun 1968.

Awalnya upaya penyelesaian sengketa ini muncul melalui Perserikatan Bangsa-Bangsa. Namun, akhirnya ASEAN mampu meredam krisis ini. Dalam forum *ASEAN Foreign Ministers' Meeting* (AMM) ke-2 yang diselenggarakan pada Agustus 1968 negara-negara anggota ASEAN mengajak kedua negara yaitu Malaysia dan Filipina untuk mengurangi tensi krisis yang tengah terjadi.

Malaysia sempat menanggapi negatif pertemuan ASEAN dengan pembahasan isu klaim Sabah. Malaysia mengancam akan memboikot pertemuan-pertemuan ASEAN apabila terus membahas isu ini. Pada 3 Januari 1969 Perdana Menteri Malaysia Tun Razak juga menyampaikan bahwa Malaysia tidak akan menarik diri dari keanggotaan ASEAN dan bertekad untuk menegakkan Deklarasi Bangkok tahun 1967.

Sepanjang tahun 1969 ASEAN terus melakukan serangkaian pertemuan yang akhirnya dapat melunakkan Filipina agar tidak lagi mempersoalkan isu klaim Sabah dalam

pertemuan ASEAN.⁵⁶ Alhasil, kedua negara dapat disatukan kembali dalam ASEAN Committee Meeting pada bulan Mei 1969. Kedua negara bahkan kembali menyambung hubungan diplomatik setelah disepakainya persetujuan antara Malaysia dan Filipina pada *ASEAN Foreign Ministers' Meeting* di bulan Desember 1969.

Dalam kasus ini ASEAN berhasil menurunkan ketegangan antara Malaysia dan Filipina dengan cara yang damai. Meskipun cara ini bukan merupakan solusi permanen namun setidaknya tidak terjadi penggunaan kekerasan dalam penyelesaian konflik ini.

2. Sengketa Kamboja dan Thailand atas Kuil Preah Vihear

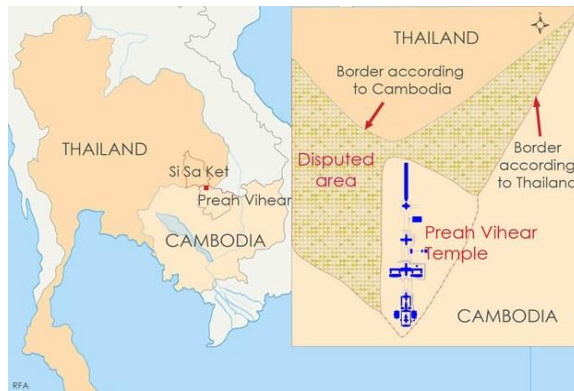
Sengketa ini dimulai saat Kamboja merdeka tahun 1953. Klaim Kamboja atas Kuil Preah Vihear memicu ketegangan dengan Thailand. Thailand yang tidak setuju mengenai keputusan Kamboja tersebut merespons dengan mengirimkan pasukan tentaranya untuk mengamankan Kuil tersebut. Kamboja yang baru saja merdeka sehingga masih lemah dalam bidang militer dan ekonomi tidak dapat berbuat banyak atas tindakan yang dilakukan Thailand tersebut. Kamboja sempat berupaya dengan mengirimkan memorandum kepada Pemerintah Thailand, namun upaya tersebut tidak direspon oleh Pemerintahan Thailand.

Sengketa atas Kuil Preah Vihear akhirnya diselesaikan melalui Mahkamah Internasional pada Juli 1962, dengan memutuskan bahwa kepemilikan Kuil Preah Vihear jatuh kepada Kamboja. Sementara Thailand diwajibkan untuk menarik pasukan tentaranya dari wilayah sekitar kuil.

⁵⁶ Cipto, B, Op.cit., hal 40.

Isu sengketa ini kembali memanas ketika pada bulan Januari 2008 Kamboja mendaftarkan Kuil Preah Vihear sebagai Situs Warisan Dunia ke UNESCO tanpa berembuk terlebih dahulu dengan Thailand.⁵⁷ Walaupun akhirnya keputusan tersebut disetujui oleh Pemerintah Thailand, sikap Pemerintah Kamboja tersebut memicu protes dari masyarakat Thailand. Pada 15 Juli 2008, tiga warga berkebangsaan Thailand ditangkap otoritas Kamboja karena berusaha untuk mendirikan bendera Thailand di dekat kuil Preah Vihear. Beberapa hari setelah kejadian tersebut kedua negara menambah jumlah pasukan di sekitar wilayah perbatasan.

Gambar 3. 4 Peta Wilayah Sengketa Antara Kamboja Myanmar



Sumber: rfa.org (diakses pada 4 Maret 2018)

Hingga di bulan Oktober 2008, terjadi baku tembak antara petugas penjaga perbatasan kedua negara. Baku tembak tersebut mengakibatkan dua tentara Kamboja dan satu tentara

⁵⁷ Mahubani, K., & Sng, J, Op.cit., hal. 309.

Thailand tewas. Baku tembak terjadi lagi pada Februari 2011, kali ini mengakibatkan korban jiwa tentara dan warga sipil dari kedua negara.

Di tengah isu sengketa yang sedang memanas, ASEAN mencoba untuk berperan sebagai *peace-making*. Dalam pertemuan *ASEAN Foreign Ministers* 20 Juli 2008, ASEAN mendesak agar kedua belah pihak untuk menahan diri dan menyelesaikan masalah tersebut secara damai.⁵⁸ Demikian juga ketika terjadi insiden baku tembak pada Februari 2011. Satu hari setelah kejadian tersebut Indonesia sebagai Ketua KTT ASEAN saat itu segera melakukan tindakan *peace-making*. Menteri Luar Negeri RI Marty Natalegawa melakukan “shuttle diplomacy” menemui Menlu Kamboja Hor Nam Hong di Phnom Penh dan Menlu Thailand Kasit Piromya di Bangkok untuk mendapatkan informasi dari pihak pertama. Bersamaan dengan Menlu Thailand dan Kamboja, Menlu Marty pun pergi menuju New York untuk memberikan pertimbangan dan masukan mengenai peran ASEAN dalam menyelesaikan konflik internal di kawasan.⁵⁹ Inisiatif dari Indonesia tersebut menghasilkan kesepakatan bahwa Indonesia akan menjadi negara *observer* untuk memantau wilayah perbatasan yang disengketakan Kamboja dan Thailand. Menurut Marty Natalegawa, Tim *observer* dari Indonesia bukanlah pasukan *peacekeeping*. Walaupun berisikan militer dan sipil, tim

⁵⁸ Ministry of Foreign Affairs Singapore. (2008, July 21). *Transcript of Door-stop Interview by Minister for Foreign Affairs George Yeo*. Diambil kembali dari www1.mfa.gov.sg/Newsroom/Press-Statements-Transcripts-and-Photos/2008/07/Transcript-of-Doorstop-Interview-by-Minister-for-Foreign-Affairs-George-Yeo-on-the-Temple-of-Preah-V

⁵⁹ Kompas.com. (2011, Februari 22). *Penyelesaian Konflik Thailand-Kamboja*. Diambil kembali dari Kompas.com: <https://internasional.kompas.com/read/2011/02/22/17270840/Penyelesaian.Konflik.Thailand-Kamboja>

observer tidak akan dipersenjatai.⁶⁰ Indonesia juga mendorong dilakukannya pembicaraan antara kedua negara yang bersengketa untuk mengakhiri konflik yang terjadi selama ini.

Keputusan tersebut cukup berhasil meredakan ketegangan antara kedua negara, walaupun sempat terjadi dua insiden di tahun 2011. ASEAN berhasil menjaga perdamaian kedua negara hingga keluarnya keputusan Mahkamah Internasional pada November 2013 yang memutuskan bahwa Kamboja memiliki kedaulatan atas areal tanah beserta *Kuil Preah Vihear*

3. Intervensi ASEAN pada Krisis Topan Nargis di Myanmar

Pada tahun 2008 bencana alam melanda negara Myanmar. Sebuah topan yang dinamai Topan Nargis mengakibatkan kerusakan parah di sebagian besar wilayah Myanmar. Bencana ini merupakan bencana alam terparah dalam sejarah Myanmar dengan laporan sekitar 200.000 jiwa tewas atau hilang. Di samping hilangnya ratusan ribu jiwa, Topan Nargis juga menyebabkan lumpuhnya sektor pertanian dan perikanan, kerugian harta benda mencapai sekitar 4,1 miliar dollar AS dan hilangnya mata pencaharian lebih dari 2,4 juta jiwa. Dalam keadaan genting ini, Pemerintah Myanmar tidak dapat menyelesaikan masalah ini seorangan. Myanmar membutuhkan bantuan dari luar negeri, meskipun Myanmar pada saat itu tengah diperintah oleh junta militer yang dikenal menutup diri dari dunia luar.

Menanggapi bencana ini, masyarakat internasional termasuk ASEAN mencoba untuk menawarkan bantuan

⁶⁰ BBC. (2011, Februari 22). *Thailand and Cambodia to accept monitors for border row*. Diambil kembali dari BBC News: <http://www.bbc.co.uk/news/world-asia-pacific-12534980>

kemanusiaan kepada pemerintah Myanmar. Presiden Amerika Serikat George Bush bahkan bersedia memberikan bantuan senilai 3,25 juta dollar AS dan bersedia memberikan lebih banyak lagi apabila Junta Militer yang berkuasa mengizinkan.⁶¹

Gambar 3. 5 Armada Angkatan Laut AS di Laut Andaman



Sumber: cbsnews.com (diakses pada 10 Maret 2018)

Militer Amerika Serikat juga memerintahkan armada Angkatan Lautnya USS Essex group untuk membawa bantuan darurat ke wilayah Myanmar. Armada Angkatan Laut USS Essex group yang terdiri dari empat kapal, 22 helikopter, dan 5.000 personel militer Amerika Serikat telah berada di perairan internasional lebih dari tiga minggu menunggu izin Myanmar untuk mengirimkan bantuan. Militer AS setidaknya telah 15 kali berupaya meyakinkan pemerintah Junta Militer agar

⁶¹ ReliefWeb. (2008, May 06). *U.S. provides \$3.25 million to aid Burma cyclone victims*. Diambil kembali dari ReliefWeb: <https://reliefweb.int/report/myanmar/us-provides-325-million-aid-burma-cyclone-victims>

menerima kapal, helikopter, dan pesawat AS untuk memberikan bantuan tambahan kepada rakyat Myanmar.⁶²

Permintaan-permintaan tersebut ditolak pemerintah Myanmar yang menaruh curiga terhadap bantuan yang berasal dari luar negeri. Pemerintah Myanmar hanya menerima bantuan-bantuan dari luar negeri dengan jumlah yang kecil dan menolak menerima pasukan sukarelawan untuk masuk dan membantu rakyat Myanmar. Padahal kondisi Myanmar saat itu sangat kekurangan jumlah dokter dan sukarelawan untuk membantu membersihkan puing-puing sisa terpaan badai Nargis.

Respon penolakan penerimaan bantuan ini dibahas pada *ASEAN Foreign Ministers' Meeting* tanggal 19 Mei 2008 di Singapura. Diskusi menjadi tegang akibat sikap pemerintah Myanmar yang bersikukuh menolak bantuan dari luar negeri. Desakan datang dari menteri-menteri luar negeri ASEAN terhadap Menteri Luar Negeri Myanmar Nyan Win agar Myanmar menarik penolakannya. George Yeo selaku tuan rumah angkat bicara dengan menyarankan Nyan Win untuk membicarakan diskusi ini kepada pemerintah pusat. Selang setelah makan siang, pemerintah Myanmar melalui Nyan Win menyatakan setuju untuk dibukanya pintu bagi bantuan luar negeri.⁶³

Selain disetujuinya bantuan asing untuk masuk ke negara Myanmar, persetujuan ini juga menjadi awal terbentuknya *The Tripartite Core Group* (TCG). TCG merupakan mekanisme kerja yang menggabungkan ASEAN, Pemerintah Myanmar, dan

⁶² NBC News. (2008, Juni 5). *Aid-laden U.S. Ships Abort Cyclone Mission*. Diambil kembali dari NBC News: http://www.nbcnews.com/id/24958259/ns/world_news-asia_pacific/t/aid-laden-us-ships-abort-cyclone-mission/#.WrZCCnpua00

⁶³ Mahbubani & Sng. (2017) Op.cit., (hal. 308)

Perserikatan Bangsa-Bangsa. TCG memiliki mandat resmi untuk mengkoordinasikan sumber daya, memfasilitasi pengerjaan termasuk akses untuk pekerja kemanusiaan, dan mengkoordinasikan pemantauan dan evaluasi terhadap perkembangan dan pencapaian. Faktor penting lainnya dari TCG ialah berfungsi sebagai forum bertukar informasi, apakah ada permasalahan dari daerah yang dapat ditangani pihak berwenang atau menginformasikan perkembangan dalam upaya pemberian bantuan kepada pihak *stakeholder*.⁶⁴ TCG berjalan dengan lancar hingga mandatnya berakhir pada 31 Juli 2010.

Dibukanya pintu bantuan baik berupa barang maupun tenaga kemanusiaan dari luar negeri ini menyelamatkan ratusan tibu nyawa di Myanmar. Keputusan ini juga membuat penilaian masyarakat internasional terhadap pemerintahan Myanmar yang dikenal tertutup menjadi lebih terbuka terhadap dunia luar. Peristiwa ini menunjukkan bahwa ASEAN harus tetap berperan penting dalam permasalahan di regionalnya.

⁶⁴ ASEAN. (2010). *Op.cit.*, (hal. 48)

BAB IV

ASEAN WAY DALAM PENYELESAIAN KONFLIK ROHINGYA

Meskipun konflik yang melibatkan etnis Rohingya di Myanmar telah berlangsung sejak puluhan tahun, konflik komunal antara etnis Rohingya dan kaum Buddhis pada bulan Juni 2012 telah menyita perhatian dari masyarakat luas. Jatuhnya puluhan korban jiwa dan hilangnya tempat tinggal bagi puluhan ribu etnis Rohingya menjadi isu panas dalam politik internasional. Aung San Suu Kyi yang merupakan aktivis prodemokrasi selaku penerima penghargaan nobel perdamaian pada tahun 1991 juga tidak menunjukkan kepeduliannya menyikapi peristiwa tersebut.

Selain itu juga terjadi konflik yang melibatkan etnis Rohingya dan militer Myanmar *Tatmadaw* di tahun 2016. Militer Myanmar yang seharusnya ditugaskan menjaga perdamaian pasca terjadinya konflik komunal tahun 2012 malah ikut menyerang etnis Rohingya di negara bagian Rakhine. Penyerangan yang dilakukan *Tatmadaw* akan semakin memperburuk keadaan etnis Rohingya di Myanmar yang selama ini menderita akibat diskriminasi Pemerintah Myanmar

Ketegangan yang melibatkan isu SARA (suku, agama, ras, dan antargolongan) ini juga dapat mengganggu kerukunan antar negara-negara anggota ASEAN, sementara ASEAN tengah bersiap dalam pembentukan Masyarakat ASEAN 2015. Dengan demikian peran dari organisasi ASEAN sangat diperlukan dalam mengakhiri permasalahan ini. Terlebih setelah diadopsinya prinsip-prinsip penegakkan HAM melalui pembentukan *ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights* (AICHR) pada tahun 2009.

ASEAN selaku organisasi antarpemerintah di regional Asia Tenggara memiliki kewajiban untuk melindungi seluruh masyarakat sipilnya, termasuk konflik dan pelanggaran HAM yang menimpa etnis Rohingya di negara bagian Rakhine. Terlebih negara-negara anggota ASEAN telah mengadopsi doktrin *Responsibility to Protect* (R2P) yang berisikan tanggung jawab negara dan komunitas internasional untuk melindungi penduduk dari genosida, kejahatan perang, kejahatan terhadap kemanusiaan dan pembersihan etnis.

Respon yang diberikan atas konflik ini haruslah dilakukan dengan cermat, dikarenakan negara-negara ASEAN menganut sebuah prinsip non-intervensi yang memperbolehkan pemerintah negara memimpin negaranya masing-masing tanpa adanya campur tangan dari luar. ASEAN dalam proses pengambilan keputusan dengan menggunakan *ASEAN Way* juga mengutamakan konsultasi dan konsensus tingkat tinggi, serta kerjasama dan interaksi regional berdasarkan diskresi, informalitas, pembentukan konsensus, dan gaya tawar-menawar yang non-konfrontatif.⁶⁵

A. Konflik Antara Etnis Rohingya dan Etnis Rakhine 2012

1. ASEAN Foreign Ministers Meeting (AMM) ke-45 (2012)

Menyikapi konflik di negara bagian Rakhine belum menunjukkan tanda-tanda berakhir, Sekretaris Jenderal ASEAN saat itu Dr. Surin Pitsuwan langsung menunjukkan reaksinya. Di sela-sela rangkaian pertemuan *ASEAN Foreign Ministers Meeting* (AMM) ke-45 di Phnom Penh, Surin Pitsuwan mengadakan pertemuan khusus dengan Menteri Luar Negeri dari Bangladesh dan Myanmar. Baik Pemerintah Myanmar

⁶⁵ (Acharya, 2001). Op.cit., (hal. 64)

maupun Bangladesh saat itu dianggap lalai karena membiarkan terjadinya konflik saling serang antara etnis Rohingya dan kaum Buddhis Rakhine.

Pada pertemuan khusus tersebut, baik Menteri Luar Negeri Bangladesh Dipu Moni maupun Menteri Luar Negeri Myanmar Wunna Maung Lwin menyepakati untuk saling bekerjasama menghentikan konflik komunal antara etnis Rohingya dan Buddhis Rakhine. Kedua negara juga berjanji akan memberikan informasi terkini kepada ASEAN mengenai keadaan kelompok-kelompok yang terlibat pertikaian di negara bagian Rakhine.⁶⁶

ASEAN Foreign Ministers Meeting ke-45 pada tanggal 17 Agustus 2012 di Phnom Penh, Kamboja menghasilkan pernyataan terkait mengenai perkembangan terkini dari konflik di negara bagian Rakhine. Pernyataan tersebut diantaranya:

1. Menteri-menteri Luar Negeri ASEAN menegaskan kembali dukungan kuat mereka kepada proses demokratisasi yang tengah berlangsung di negara Myanmar. Para Menteri Luar Negeri ASEAN juga mengikuti perkembangan terbaru di Negara bagian Rakhine, Myanmar, menyusul insiden yang terjadi pada 28 Mei 2012 dan 3 Juni 2012.
2. Mereka (Menteri-menteri Luar Negeri ASEAN) menyambut baik langkah-langkah yang diambil Pemerintah Myanmar untuk mengatasi permasalahan domestik, termasuk kerja samanya dengan badan-badan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan organisasi-organisasi non-pemerintah atau *non-government organizations* (NGO's) untuk menangani

⁶⁶ ASEAN Secretariat News. (2012, July 13). *ASEAN Heeds Concerns for the Rohingya Tension*. Diambil kembali dari ASEAN: <http://asean.org/asean-heeds-concerns-for-the-rohingya-tension/>

kebutuhan kemanusiaan dari orang-orang dan masyarakat yang terkena dampak konflik.

3. Para Menteri Luar Negeri ASEAN menyatakan kesiapan mereka, atas permintaan Pemerintah Myanmar, untuk memberikan dukungan yang diperlukan dalam menangani bantuan kemanusiaan di Negara Bagian Rakhine.
4. Para Menteri Luar Negeri ASEAN mengingatkan dan menggarisbawahi bahwa promosi solidaritas dan keharmonisan di antara berbagai komunitas di Myanmar merupakan bagian integral dari proses demokratisasi dan reformasi Myanmar yang sedang berlangsung. Mereka menyatakan keyakinan dan harapan bahwa Myanmar akan terus dan tetap konsisten dengan komitmennya pada irreversibilitas proses demokratisasi dan reformasi di negara ini.

2. ASEAN Summit ke-21 (2012)

Meskipun krisis Rohingya masih masih berlangsung, pembahasan mengenai permasalahan tersebut sangat minim dilakukan. Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN ke-21 di Phnom Penh ini lebih berfokus pada Pemberlakuan Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) yang direncanakan akan dimulai pada tahun 2015. Selain Pemberlakuan MEA, KTT kali ini juga menitikberatkan kepada pembahasan sengketa Laut Cina Selatan.

Untuk membantu meringankan penderitaan warga yang terkena dampak konflik, ASEAN menawarkan kerjasama tiga pihak antara ASEAN, Pemerintah Myanmar, dan PBB. Sebuah bentuk kerjasama efektif yang pernah diterapkan pada saat musibah Topan Nargis di Myanmar pada tahun 2008. Namun Pemerintah Myanmar menolak tawaran tersebut dengan dalih

bahwa konflik yang terjadi merupakan urusan internal Myanmar.⁶⁷

Surin Pitsuwan pada pertemuan ini mengingatkan bahwa isu Rohingya dapat mengganggu kestabilan wilayah Asia Tenggara apabila komunitas internasional termasuk ASEAN gagal dalam merespon secara efektif krisis yang tengah berlangsung. Ia juga menyatakan bahwa ASEAN tidak dapat menekan Pemerintah Myanmar untuk memberikan Hak Kewarganegaraan kepada etnis Rohingya. Namun, ASEAN harus meningkatkan bantuan kemanusiaan ke negara Arakan demi mengurangi risiko ketidakstabilan regional.

Perdana Menteri Kamboja Hun Sen yang merupakan tuan rumah ASEAN Summit dan ketua ASEAN pada saat itu dengan hati-hati menghindari pernyataan yang berhubungan dengan kekerasan etnis di negara bagian Rakhine. meskipun ia menggarisbawahi pentingnya menghormati perbedaan agama dalam masyarakat ASEAN.

Meskipun tidak membahas situasi di Rakhine secara khusus, pertemuan kali ini justru menghasilkan sebuah deklarasi mengenai HAM yang bernama *ASEAN Human Right Declaration* (AHRD). Deklarasi yang ditandatangani 10 pemimpin anggota-anggota ASEAN ini berisikan komitmen negara-negara ASEAN untuk mendorong pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia di kawasan, serta komitmen ASEAN terhadap Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, Deklarasi dan Program Aksi Wina, dan instrumen-instrumen hak asasi manusia internasional.

⁶⁷ (Kassim, 2012) Op.cit.

Meskipun deklarasi ini berkesan positif terhadap penegakkan HAM, terdapat sebuah celah yang dapat disalahgunakan. Pada Prinsip Umm AHRD poin ke-7 berisikan;

Semua hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam Deklarasi ini harus diperlakukan secara adil dan setara, dalam kedudukan yang sama dan dengan penekanan yang sama. Pada saat yang sama, pemenuhan hak asasi manusia harus diletakkan dalam konteks kawasan dan nasional, mengingat latar belakang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, sejarah, dan agama yang berbedabeda.

Adanya pertimbangan “konteks kawasan dan nasional” dapat membatasi penegakkan HAM menggunakan standar dari negara-negara ASEAN secara individual. Dengan demikian, penegakkan HAM dalam deklarasi ini berpotensi tidak sejalan dengan standar internasional. Selain kelemahan dari poin di atas, deklarasi ini juga berisikan pembatasan HAM dengan mendahulukan kepentingan keamanan nasional, ketertiban umum, kesehatan masyarakat, keselamatan masyarakat, moralitas masyarakat, dan kesejahteraan umum rakyat.

B. Krisis Manusia Perahu (2015)

Krisis Manusia Perahu berawal muncul pada bulan Mei 2015. Saat itu kepolisian Thailand menemukan setidaknya 139 lokasi kuburan di sepanjang perbatasan antara Thailand dan Myanmar. Laporan kepolisian menunjukkan ratusan jenazah tersebut adalah etnis Rohingya yang kelaparan hingga mati atau meninggal karena penyakit ketika ditahan oleh pedagang manusia yang menunggu pembayaran uang tebusan sebelum menyelundupkan para imigran ke Malaysia.⁶⁸ Penemuan

⁶⁸ Human Right Watch. (2015, May 1). *Thailand: Mass Graves of Rohingya Found in Trafficking Camp*. Diambil kembali dari Human

kuburan massal ini memicu Pemerintah Thailand melakukan razia besar-besaran demi penumpasan perdagangan manusia. Akibatnya, para penyelundup manusia meninggalkan kapal para imigran di laut Adaman. Ratusan imigran yang menggunakan kapal tersebut terkatung-katung mengharapkan bantuan dari negara Thailand, Indonesia, dan Malaysia. Data dari *International Organization for Migration* (IOM) memperkirakan lebih dari 8.000 imigran Rohingya terdampar di laut.

Awalnya, Pemerintah Thailand, Indonesia dan Malaysia memutuskan untuk menolak kedatangan pengungsi manusia perahu. Tindakan yang dilakukan ketiga negara tersebut ialah memberikan bantuan pangan, air bersih, pengobatan serta bahan bakar kepada para pengungsi, tetapi mereka dilarang mendarat.⁶⁹ Kapal Angkatan Laut Indonesia dan Malaysia bahkan dilaporkan telah menyeret sejumlah perahu pengungsi yang mendekati kawasan pantainya kembali ke laut lepas. Sebagaimana pernyataan dari Wakil Menteri Dalam Negeri Malaysia Wan Junaidi Tuanku Jaafar mengatakan bahwa penolakan ini merupakan pesan keras bagi Pemerintah Myanmar untuk memperlakukan warganya dengan berperikemanusiaan.⁷⁰ Wan Junaidi selanjutnya mengatakan

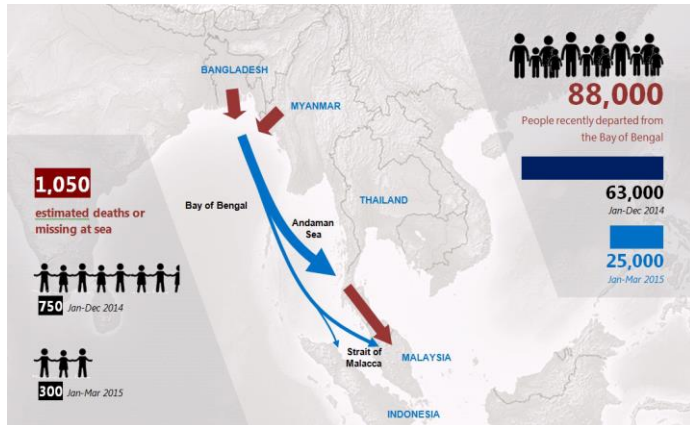
Right Watch: <https://www.hrw.org/news/2015/05/01/thailand-mass-graves-rohingya-found-trafficking-camp>

⁶⁹ Deutsche Welle. (2015, Mei 13). *Thailand, Malaysia dan Indonesia Tolak Manusia Perahu Rohingya*. Diambil kembali dari Deutsche Welle: <http://p.dw.com/p/1FP1j>

⁷⁰ Popham, P. (2015, May 15). *Asia's migrant crisis: Thousands of trafficked boat people cast back out to sea by Indonesia, Malaysia and Thailand*. Diambil kembali dari Independent: <https://www.independent.co.uk/news/world/asia/asias-migrant-crisis-thousands-of-trafficked-boat-people-cast-back-out-to-sea-by-indonesia-malaysia-10254262.html>

bahwa jika Malaysia menerima mereka (pengungsi Rohingya), maka ribuan dari mereka akan ikut menyusul dari Myanmar dan Bangladesh.

Gambar 4. 1 Pergerakan Pengungsi Rohingya Menggunakan Perahu Tahun 2014-2015



Sumber: UNHCR (diunduh pada 10 Agustus 2018)

1. Pertemuan Trilateral Indonesia Malaysia Dan Thailand

Menanggapi nasib lebih lanjut para pengungsi etnis Rohingya tersebut, pada tanggal 20 Mei 2015, Menteri Luar Negeri dari tiga negara ASEAN yaitu Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi, Menteri Luar Negeri Malaysia Datuk Seri Anifah Aman, dan Menteri Luar Negeri Thailand Jenderal Tanasak Patimapragnorn mengadakan pertemuan di Kuala Lumpur, Malaysia. Pertemuan tripartit ini mendiskusikan solusi bersama demi mengatasi permasalahan regional itu. Para menteri tersebut menyatakan keperihatinannya terhadap situasi terkini yang dihadapi etnis Rohingya. Ketiga Menteri menyepakati bahwa permasalahan pengungsi ini telah menjadi permasalahan regional yang butuh penanganan bersama.

Pertemuan ini menunjukkan komitmen ketiga negara ASEAN tersebut mencari solusi yang dapat diterima bersama dengan melibatkan negara asal, transit, dan tujuan melalui prinsip *burden-sharing* dan *shared-responsibility*. Cara ini diperlukan demi mencegah isu *irregular migrants* agar tidak berevolusi menjadi krisis kemanusiaan di kawasan Asia Tenggara. Ketiga Menteri Luar Negeri menuntut keadilan ditegakkan terhadap para penyelundup dan sindikat perdagangan manusia untuk mencegah isu *irregular migrants*. Selain menekan aktivitas perdagangan manusia, pertemuan ini juga menyepakati langkah-langkah yang diambil Kementerian Luar Negeri Indonesia, Malaysia, dan Thailand terkait dengan permasalahan Rohingya, diantaranya:

- a. Melakukan operasi *Search and Rescue (SAR)* bagi para pengungsi yang masih terapung di lautan;
- b. Melaksanakan patroli laut terkoordinasi dan memfasilitasi evakuasi di laut ketika kapal-kapal berisi migran tersebut ditemukan;
- c. Menyediakan bantuan kemanusiaan, termasuk *shelter*, makanan, obat-obatan, dan kebutuhan lainnya bagi para migran yang terdampar di wilayah tiga negara;
- d. Meningkatkan kerjasama dan koordinasi dengan UNHCR dan IOM dalam mengidentifikasi dan menverifikasi imigran, termasuk mencari negara ketiga untuk proses *resettlement*;
- e. Mengaktifkan sumber daya milik *ASEAN Coordinating Centre for Humanitarian Assistance on Disaster Management (AHA Centre)* untuk menyelesaikan krisis ini.⁷¹

⁷¹ Kementerian Luar Negeri RI. (2015). Rohingya: Antara Solidaritas ASEAN dan Kemanusiaan. Dalam *Majalah Masyarakat ASEAN Edisi 8* (hal. 10). Jakarta Pusat.

Menurut pernyataan Menlu Malaysia Anifah Aman, Indonesia dan Malaysia sepakat untuk memberikan bantuan kepada 7000 imigran gelap yang masih berada di laut. Kedua negara siap membangun tempat penampungan sementara untuk waktu satu tahun bagi para pengungsi. Anifah Aman juga menegaskan bahwa penolakan dan penarikan kapal ke lautan yang sempat dilakukan sebelumnya tidak akan terjadi lagi.

2. Pertemuan Antara Menlu Indonesia dan Menlu Myanmar

Esoknya, Menlu Indonesia mengadakan lawatan ke Naypyitaw untuk menemui Menlu Myanmar U Wunna Maung Lwin. Kunjungan Indonesia ini membahas arus pengungsi Rohingya yang telah membanjiri kawasan Asia Tenggara. U Wunna Maung Lwin menyatakan, Myanmar menyetujui empat poin. Poin-poin tersebut antara lain:

1. Pemerintah Myanmar sepakat untuk memperkuat langkah dalam pencegahan terjadinya pergerakan arus imigran ilegal dari teritorinya.
2. Pemerintah Myanmar bersedia bekerjasama dengan negara-negara di kawasan Asia Tenggara dalam rangka mengatasi isu *human trafficking* atau perdagangan manusia..
3. Myanmar segera memerintahkan Kedutaan Besarnya untuk melakukan kunjungan kekonsuleran ke tempat-tempat dimana Indonesia dapat menampung para pengungsi Rohingya.

4. Myanmar menyambut baik tawaran kerja sama Indonesia untuk pembangunan negara bagian Rakhine secara inklusif dan non-diskriminatif.⁷²

3. **Special Meeting on Irregular Migration in the Indian Ocean di Thailand**

Usaha mengatasi permasalahan ‘krisis manusia perahu’ selanjutnya dilakukan Pemerintah Thailand dengan menyelenggarakan pertemuan khusus membahas migrasi tidak teratur di wilayah Samudra Hindia pada 29 Mei 2015. Pertemuan ini diikuti oleh perwakilan dari negara-negara di kawasan tersebut, diantaranya Afghanistan, Australia, Bangladesh, Kamboja, India, Indonesia, Iran, Laos, Malaysia, Myanmar, Selandia Baru, Pakistan, Papua Nugini, Filipina, Sri Lanka, Vietnam, dan Thailand, serta perwakilan dari *United Nations High Commissioner for Refugees* (UNHCR), *United Nations Office on Drugs and Crime* (UNODC), dan *International Organization for Migration* (IOM). Pertemuan ini tidak menyebutkan kata pengungsi etnis Rohingya secara langsung, melainkan menggunakan istilah migran tidak teratur.⁷³

Pertemuan yang berlangsung di Bangkok ini menghasilkan 17 poin proposal dan rekomendasi tanggapan langsung mengenai respon segera terhadap para imigran yang terdampar di laut serta pencegahan menyeluruh terhadap migrasi tidak teratur, penyelundupan migran, dan perdagangan

⁷² Santi , N. K. (2015, May 22). *RI Sambut Baik Komitmen Myanmar atas Pengungsi Rohingya*. Diambil kembali dari Viva:

<https://www.viva.co.id/berita/dunia/628828-ri-sambut-baik-komitmen-myanmar-atas-pengungsi-rohingya>

⁷³ Beah, J. (2016). The Southeast Asian “Boat People Crisis” of 2015. (Hal. 10).

manusia. Dalam proposal ini juga membahas bantuan senilai USD 3 juta dari Amerika Serikat atas permintaan IOM, dan dana sebesar AUD 5 juta dari Australia untuk bantuan kemanusiaan ke Rakhine State dan Cox's Bazaar.

Gambar 4. 2 Pertemuan Antar Menteri ASEAN Membahas Isu Irregular Movement



Sumber: asean.org (diunduh pada 12 Agustus 2018)

4. Emergency ASEAN Ministerial Meeting on Transnational Crime

Upaya berikutnya dilakukan ASEAN dengan mengadakan pertemuan pada tanggal 2 Juli 2015 yang berjudul *Emergency ASEAN Ministerial Meeting on Transnational Crime* (EAMMTC) di Kuala Lumpur. Tujuan pertemuan darurat ini adalah untuk merencanakan rencana kerja dan menemukan solusi yang layak bagi permasalahan *irregular*

movement yang berhubungan dengan kejahatan perdagangan manusia dan penyelundupan manusia di kawasan Asia Tenggara. Setidaknya ada 3 isu pokok yang dibahas, pergerakan *Irregular Movement of Persons* di Asia Tenggara, hubungan antara *Irregular Movement of Persons* dengan perdagangan manusia dan penyelundupan manusia, dan rencana kedepan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.

Hasil dari pertemuan darurat antar menteri ASEAN ini berupa kesepakatan untuk memperkuat penegakan hukum terhadap perdagangan manusia, imigrasi ilegal dan kejahatan lain di tingkat nasional dan regional. Pertemuan ini juga menyetujui pembentukan Satuan Tugas untuk merespon situasi serupa di waktu yang akan datang, serta mendukung pembentukan *trust fund* untuk upaya-upaya kemanusiaan yang berhubungan dengan *Irregular Movement of Persons* di wilayah Asia Tenggara.⁷⁴ Menteri Dalam Negeri Malaysia Ahmad Zahid Hamidi, yang menjadi ketua pertemuan ini menyatakan pentingnya memperkuat kerjasama dengan mitra dialog ASEAN dan Organisasi Internasional lainnya untuk memerangi perdagangan manusia dan imigrasi ilegal.

C. Konflik Antara Etnis Rohingya dan Militer Myanmar Tahun 2016

Konflik yang terjadi di negara bagian Rakhine kali ini melibatkan pasukan pemberontak bernama Arakan Rohingya Salvation Army (ARSA) dan Pasukan Keamanan Myanmar. Konflik dimulai pada dini hari tanggal 9 Oktober 2016, ketika pasukan pemberontak berjumlah 90 orang menyerbu kantor polisi di desa Kyiganbyin, Kota Maungdaw. Peristiwa penyerangan ini mengakibatkan 6 petugas kepolisian tewas dan 51 senjata dan lebih dari 10.000 butir amunisi berhasil dijarah

⁷⁴ *Ibid*

para pemberontak. Beberapa operasi penyerangan kembali dilancarkan oleh para pemberontak di dua desa yang berbeda, mengakibatkan 2 korban tewas dari pihak kepolisian.⁷⁵ Sekertaris Negara Myanmar U Tin Maung Swe menyatakan penyerangan ini berasal dari kelompok Rohingya Solidarity Organisation (RSO), sebuah organisasi politik Rohingya yang beralih menjadi organisasi militan. Hingga akhirnya kelompok ARSA menyatakan bertanggung jawab terhadap serangkaian serangan tersebut.⁷⁶ ARSA juga diklaim bertanggung jawab atas berbagai peristiwa penyerangan terhadap petugas keamanan Myanmar pada tahun 2017.

Angkatan Bersenjata Myanmar (Tatmadaw) membalas peristiwa penyerangan tersebut dengan melancarkan “operasi pembersihan”, guna mencari tersangka yang digambarkan sebagai “kelompok pemberontak bersenjata”. Pasukan militer dikabarkan melancarkan operasi militer berupa pembakaran, pembunuhan, dan pemerkosaan terhadap etnis Rohingya. Wilayah Rakhine Utara dideklarasikan sebagai “zona militer”, mengakibatkan dibatasinya pergerakan bantuan kemanusiaan, dan dilarangnya akses masuk bagi para jurnalis serta pemantau HAM.⁷⁷ Kantor Koordinasi Urusan Kemanusiaan PBB

⁷⁵ The Guardian. (2016, Oktober 10). *Myanmar says nine police killed by insurgents on Bangladesh border*. Diambil kembali dari The Guardian:

<https://www.theguardian.com/world/2016/oct/10/myanmar-nine-police-killed-insurgents-bangladesh-border>

⁷⁶ BBC Indonesia. (2017, September 6). *Siapaakah Tentara Pembebasan Rohingya Arakan?* Diambil kembali dari BBC: <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-41173529>

⁷⁷ Human Rights Watch. (2016, December 21). *Burma: Rohingya Recount Killings, Rape, and Arson*. Diambil kembali dari Human Rights Watch: <https://www.hrw.org/news/2016/12/21/burma-rohingya-recount-killings-rape-and-arson>

melaporkan lebih dari 30.000 orang diperkirakan mengungsi secara internal. Ribuan lainnya dilaporkan mengungsi menuju Bangladesh. Sekitar 130.000 orang tidak dapat mengakses bantuan kemanusiaan.

1. Respon Malaysia dan Indonesia

Malaysia merespon keras atas tindakan yang dilakukan militer Myanmar terhadap etnis Rohingya. Presiden Malaysia Najib Razak berpidato mengecam tindakan apatis Pemerintah Myanmar. Ia juga mengkritik Pemerintah Myanmar yang hanya menjalankan satu pasal dari Piagam ASEAN yaitu prinsip non-intervensi, dan tidak memedulikan pasal-pasal lainnya. Akibat dari pidato tersebut, Aung San Suu Kyi menolak rencana pertemuan dengan Menteri Luar Negeri Malaysia Anifah Aman.⁷⁸ Myanmar bahkan juga sempat memutuskan untuk melarang pengiriman tenaga kerjanya ke negara Malaysia pada 6 Desember 2016 dengan alasan keamanan. Sementara itu, Presiden Indonesia Joko Widodo mengutus Menlu Retno Marsudi untuk menemui Penasihat Negara Myanmar Aung San Suu Kyi. Pertemuan kedua negara pada tanggal 6 Desember membahas situasi terkini di negara bagian Rakhine. Menlu RI menyampaikan rencana bantuan Indonesia untuk Myanmar berupa pembangunan rumah sakit. Kedua negara juga sepakat untuk meningkatkan kerjasama *interfaith dialogue*, serta bantuan kapasitas kepada Myanmar dalam bidang *good governance*, demokrasi, dan HAM.⁷⁹ Setelah pertemuan ini

⁷⁸ Tuwo, A. G. (2016, Desember 9). *Kala PM Malaysia Ikut Demo, Ini yang Dilakukan RI untuk Rohingya*. Diambil kembali dari Liputan 6: <https://www.liputan6.com/global/read/2673655/kala-pm-malaysia-ikut-demo-ini-yang-dilakukan-ri-untuk-rohingya>

⁷⁹ Kementerian Luar Negeri RI. (2016, Desember 7). *Menlu Retno Tekankan Keprihatinan Indonesia Saat Bahas Situasi Rakhine State Dengan State Counsellor Daw Aung San Suu Kyi*. Diambil kembali dari Kementerian Luar Negeri Indonesia:

Pemerintah Myanmar memanggil negara-negara anggota ASEAN untuk menggelar pertemuan antar Menteri Luar Negeri ASEAN.

2. Pertemuan Retreat Menlu ASEAN di Myanmar

Pada 19 Desember 2016, Penasihat Negara sekaligus Menteri Luar Negeri Myanmar Aung San Suu Kyi bertemu dengan Menteri-menteri Luar Negeri ASEAN di Yangon, Myanmar. Aung San Suu Kyi menginformasikan kepada para Menlu ASEAN upaya-upaya bantuan dari Pemerintah Myanmar kepada komunitas etnis Rohingya dan etnis Rakhine yang terlibat dalam konflik kekerasan. Salahsatunya ialah membentuk *Advisory Commission on Rakhine State* yang dipimpin oleh Dr. Kofi Annan (mantan Sekjen PBB) dan Tim Investigasi Nasional. Ia juga meminta waktu dan ruang untuk menyelesaikan permasalahan di negaranya.

Menlu Malaysia Anifah Aman pada pertemuan ini meminta Pemerintah Myanmar untuk membuka akses bantuan kemanusiaan yang selama operasi militer ditutup. Anifah Aman mengingatkan, kekerasan yang dilakukan *Tatmadaw* dapat mengundang “krisis manusia perahu” kembali terjadi. Beliau memberikan usulan agar ASEAN mengkoordinir bantuan kemanusiaan ke negara bagian Rakhine, sebagaimana yang ASEAN lakukan pada saat bencana Topan Nargis di Myanmar tahun 2008. Anifah Aman juga mengusulkan agar ASEAN membentuk kelompok independennya sendiri untuk menyelidiki dan memverifikasi situasi di Rakhine dan memberikan rekomendasi kepada menteri luar negeri tentang bagaimana situasi di sana harus ditangani.⁸⁰ Permintaan agar

<https://www.kemlu.go.id/id/berita/Pages/Menlu-Retno-Tekankan-Keprihatinan-Indonesia-Saat-Bahas-Situasi-Rakhine-State.aspx>

⁸⁰ Gerin, R. (2016, Desember 19). *Aung San Suu Kyi Discusses Rakhine Crisis With ASEAN Foreign Ministers*. Diambil kembali dari Radio Free

akses bantuan kemanusiaan ke Rakhine State dibuka secara luas juga diutarakan oleh Menlu Indonesia Retno Marsudi. Menlu Retno mendesak semua anggota ASEAN untuk terus mendukung secara konstruktif dan membantu Myanmar dalam mengatasi situasi rumit di negara bagian Rakhine.⁸¹

Atas saran Menlu RI saat pertemuan 6 Desember lalu, Aung Sang Suu Kyi menyampaikan bahwa akses bagi media termasuk media asing mulai dibuka, dan akses bantuan kemanusiaan juga telah diberikan lebih besar, termasuk untuk bantuan kemanusiaan dari PBB mulai tanggal 19 Desember 2016. Akses kemanusiaan kepada PBB telah dikonfirmasi oleh wakil PBB di Myanmar dalam Pertemuan dengan Menlu Retno di Yangoon tanggal 18 Desember 2016.⁸² Dibukanya akses bantuan juga dimanfaatkan Indonesia dengan mengirimkan bantuan kemanusiaannya, berupa 10 kontainer yang berisikan mie instant, makanan bayi berupa gandum dan sereal, serta sarung.

Asia:<https://www.rfa.org/english/news/myanmar/aung-san-suu-kyi-discusses-rakhine-crisis-with-asean-foreign-ministers-12192016145727.html>

⁸¹ *Ibid*

⁸² Kementerian Luar Negeri. (2016, Desember 19). *Menlu Retno: ASEAN Ambil Aksi Konkret Untuk Kembalikan Stabilitas di Rakhine State*. Diambil kembali dari Kementerian Luar Negeri RI: <https://www.kemlu.go.id/id/berita/Pages/Menlu-Retno-ASEAN-ambil-aksi-konkret-untuk-kembalikan-stabilitas-di-Rakhine-State.aspx>

Tabel 4. 1 Timeline Penyelesaian Permasalahan Konflik Rohingya Saat Operasi Militer 2016

9 Oktober 2016	Terjadi serangkaian penyerangan terhadap petugas kepolisian Myanmar. Sembilan polisi tewas dan persenjataan milik kepolisian dijarah penyerang.
Oktober 2016 (setelah peristiwa penyerangan)	<i>Tatmadaw</i> memberlakukan “operasi pembersihan” demi mencari pelaku penyerangan sebelumnya. <i>Tatmadaw</i> dikabarkan melakukan penyerangan terhadap warga sipil. Akses bantuan kemanusiaan dari luar ditutup.
4 Desember 2016	Presiden Malaysia Najib Razak mengecam keras tindakan Pemerintah Myanmar. Akibatnya, pertemuan antara Malaysia dan Myanmar ditolak. Pemerintah Myanmar juga menghentikan pengiriman tenaga kerja ke Malaysia.
6 Desember 2016	Menlu Retno Marsudi bertemu Aung San Suu Kyi. Keduanya membahas situasi terkini di Myanmar, serta rencana kelanjutan bantuan Indonesia ke Myanmar.
19 Desember 2016	Diadakan pertemuan darurat antar Menlu ASEAN di Myanmar. Indonesia dan Malaysia meminta Pemerintah Myanmar membuka kembali pintu bantuan kemanusiaan dari luar. Myanmar menyetujui permintaan tersebut.

Pada bulan Agustus 2017, peristiwa penyerangan yang dilakukan kelompok bersenjata ARSA kembali terjadi. Respon yang sama juga dilakukan militer Myanmar dengan memberlakukan “operasi pembersihan”. Operasi yang juga didukung kaum militan Buddhis mengakibatkan setidaknya 1000 orang terbunuh, dan lebih dari 300.000 orang mengungsi. ASEAN merespon dengan menerbitkan *Chairman Statement* saat diadakannya pertemuan tertutup antar Menlu ASEAN di Markas Besar PBB tanggal 23 September 2017. *Chairman Statement* dari para Menlu ASEAN tersebut menekankan pentingnya meningkatkan akses bantuan kemanusiaan ke wilayah yang terdampak konflik. Menlu ASEAN juga mendukung usaha Pemerintah Myanmar untuk menciptakan keamanan dan kedamaian di negara bagian Rakhine.

Meskipun ASEAN telah beberapa kali menunjukkan usaha dengan mengadakan serangkaian pertemuan, konflik yang menimpa etnis Rohingya sampai kini belum dapat diselesaikan secara tuntas. Upaya-upaya yang dilakukan ASEAN juga hanya bersifat mengatasi permasalahan secara sementara, sementara akar permasalahan berupa diskriminasi hak kewarganegaraan dan konflik antar etnis tidak dapat diintervensi ASEAN.

BAB V

KESIMPULAN

Rohingya sebagai etnis minoritas di Myanmar telah mengalami diskriminasi selama puluhan tahun. Pemerintah Myanmar melalui UU Kewarganegaraan Myanmar tahun 1982, tidak mengakui etnis Rohingya sebagai warga negara. UU Kewarganegaraan Myanmar tahun 1982 hanya mengakui etnis yang menetap permanen di Myanmar sebelum tahun 1823. Meskipun beberapa sejarawan menyebutkan etnis Rohingya telah menempati Myanmar jauh sebelum tahun 1823, Pemerintah Myanmar tetap menganggap etnis Rohingya sebagai kaum imigran dari Bangladesh yang mendiami wilayah Arakan secara ilegal, sejak tibanya Kemaharajaan Britania. Akibatnya, etnis Rohingya yang berstatus *stateless* atau tanpa kewarganegaraan di Myanmar kehilangan hak-hak dasar mereka. Pemerintah Myanmar juga telah melakukan pengusiran terhadap etnis Rohingya. Sebuah operasi militer bernama *Operation Nagamin (Dragon King Operation)* yang bertujuan untuk menyaring warga asing menghasilkan 200.000 orang etnis Rohingya diusir dan melarikan diri ke Bangladesh.

Selain mendapatkan diskriminasi dari Pemerintah Myanmar, etnis Rohingya di Myanmar juga telah menderita akibat serangkaian konflik yang melibatkan kaum Buddha Rakhine. Konflik saling serang antara etnis Rohingya dan kaum Buddha Rakhine terjadi pada tahun 2012 berawal dari kabar pembunuhan gadis etnis Rakhine oleh pemuda beretnis Rohingya. 88 orang tewas, yang di antaranya 31 warga dari etnis Rakhine dan 57 warga Muslim Bengali. Selain itu, rumah-

rumah dan bangunan keagamaan dari kedua komunitas juga habis terbakar. Data dari Amnesty Internasional juga menyebutkan lebih dari 140.000 jiwa menjadi pengungsi internal dan menempati tempat penampungan sementara di negara bagian Rakhine.

Etnis Rohingya juga terlibat konflik dengan angkatan bersenjata Myanmar. Terjadi peristiwa penyerangan terhadap petugas keamanan Myanmar yang diyakini berasal dari kelompok bersenjata beretnis Rohingya. Demi menangkap pelaku penyerangan, pasukan militer dikabarkan melancarkan operasi militer berupa pembakaran, pembunuhan, dan pemerkosaan terhadap etnis Rohingya. Wilayah Rakhine Utara dideklarasikan sebagai “zona militer”, mengakibatkan dibatasinya pergerakan bantuan kemanusiaan, dan dilarangnya akses masuk bagi para jurnalis serta pemantau HAM. Akibatnya, lebih dari 30.000 orang diperkirakan mengungsi secara internal, ribuan lainnya dilaporkan mengungsi menuju Bangladesh, dan sekitar 130.000 orang tidak dapat mengakses bantuan kemanusiaan.

Demi mencegah atau menghentikan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) berat, sebagaimana yang dialami etnis Rohingya di Myanmar, diperlukan keterlibatan dari negara-negara lain. Keterlibatan ASEAN untuk menangani permasalahan di Myanmar haruslah menggunakan mekanisme ASEAN Way, yang merupakan prinsip-prinsip khusus negara-negara anggota ASEAN dalam upaya penyelesaian masalah.

Sepanjang tahun 2012 hingga tahun 2016, ASEAN baik secara formal maupun nonformal telah beberapa kali menunjukkan usahanya untuk menyelesaikan permasalahan etnis Rohingya di negara bagian Rakhine. Keterlibatan ASEAN dengan menggunakan prinsip ASEAN Way ditunjukkan dengan beberapa kali melakukan pertemuan. Pertemuan-pertemuan ini menjadi area *bargaining* antara negara-negara ASEAN dalam

usahanya mengatasi permasalahan yang tengah berlangsung. Contohnya, pada pertemuan antara Menteri Luar Negeri Indonesia, Malaysia, dan Thailand pada 20 Mei 2015, dilakukan untuk membahas bagaimana langkah lebih lanjut antara ketiga negara tersebut untuk menangani permasalahan "Krisis Manusia Perahu".

ASEAN juga dapat menjadi instrumen politik luar negeri negara-negara anggotanya. Sebagaimana saat tekanan-tekanan terjadi di kalangan masyarakat Indonesia dan Malaysia atas kekerasan dan pelanggaran HAM yang menimpa etnis Rohingya. ASEAN dapat menjadi sarana untuk menyalurkan tekanan tersebut. Sebagaimana yang terjadi saat ditutupnya akses bantuan kemanusiaan pada tahun 2016. Presiden Indonesia Joko Widodo bereaksi dengan mengirimkan utusannya yaitu Menlu Retno Marsudi untuk menemui secara langsung Penasihat Negara Myanmar Aung San Suu Kyi. Pertemuan ini menghasilkan diadakannya pertemuan lebih lanjut antara Menteri Luar Negeri ASEAN di Yangon, dan dibukannya kembali pintu bantuan kemanusiaan dari luar negeri.

Sementara itu, reaksi keras ditunjukkan Presiden Malaysia pada demonstrasi menentang Pemerintah Myanmar. Hal ini direspon negatif oleh Pemerintah Myanmar, dengan menolak rencana pertemuan dengan Menteri Luar Negeri Malaysia Anifah Aman, dan dilarangnya pengiriman tenaga kerja Myanmar ke Malaysia. Sikap yang ditunjukkan Pemerintah Myanmar di atas menunjukkan bahwa respon yang diberikan oleh anggota ASEAN harus sejalan dengan prinsip-prinsip ASEAN Way. Dengan menggunakan ASEAN Way, negara-negara ASEAN dapat menggunakan musyawarah dan mufakat secara damai dalam pengambilan keputusan.

Namun, upaya-upaya yang dilakukan ASEAN menggunakan ASEAN Way selama ini masih bersifat penyelesaian masalah secara sementara. Upaya yang dilakukan

umumnya berupa pemberian bantuan kemanusiaan atau bantuan tempat tinggal sementara bagi para pengungsi. Mendiang Surin Pitsuwan sendiri menyatakan bahwa ASEAN tidak dapat berperan terlalu jauh atau bahkan menekan Myanmar untuk memberikan hak kewarganegaraan untuk para etnis Rohingya di Myanmar. Alhasil, ASEAN hingga saat ini masih belum dapat menyelesaikan permasalahan di negara Myanmar dengan tuntas.

Penyelesaian konflik dengan pendekatan ASEAN Way akan berhasil apabila Myanmar sebagai negara anggota ASEAN menaati Piagam ASEAN secara keseluruhan, seperti kewajiban menegakkan Hak Asasi Manusia dan keadilan sosial, dan bukan hanya menaati salah satu pasal yaitu prinsip non-intervensi. Tanpa adanya sikap serius dari Pemerintah Myanmar, ASEAN sebagai organisasi regional Asia Tenggara tidak akan bisa untuk membantu dan berperan secara lanjut untuk menyelesaikan masalah etnis Rohingya ini secara tuntas.

DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Jurnal

- Acharya, A. (2001). In *Constructing a Security Community in South East Asia: ASEAN and the Problem of Regional Order* (pp. 45-46). London and New York: Routledge.
- Alam, M. A. (1999). *A Short Historical Background of Arakan*, 7.
- ASEAN. (2010). *Compassion in Action: The Story of the ASEAN-led Coordination in Myanmar*. Jakarta.
- Aziz, H. (2016). Perjanjian Sulu-Overbeck 1878. *Tuntutan Kesultanan Sulu Terhadap Sabah*, 284.
- Beah, J. (2016). The Southeast Asian “Boat People Crisis” of 2015. 10.
- Chandrawati, N. (2006). *ASEAN Regional Forum dan Kontribusinya terhadap Ketahanan Nasional Indonesia di bidang pertahanan dan keamanan. Periode 1994-2006*, 27.
- Cipto, B. (2007). Pembentukan ASEAN. In *Hubungan Internasional di Asia Tenggara* (p. 23). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

- Collins, A. (2003). In *Security and Southeast Asia: Domestic, Regional, and Global Issues* (p. 114). Boulder: Lynne Rienner Publishers, Inc.
- Eliza, E., Heryandi, & Syofyan, A. (2014). Intervensi Kemanusiaan (Humanitarian Intervention) Menurut Hukum Internasional dan Implementasinya dalam Konflik Bersenjata. *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum Volume 8 No. 4*, 629.
- Fathun, L. M. (2017). Intervensi ICRC dalam Krisis Kemanusiaan di Palestina . *International & Diplomacy Vol. 2, No. 2* , 254.
- Hartimah, T. (2010). *Rekam Jejak Muslim Rohingya di Myanmar*, 88.
- Hennida, C. (2015). Desain Rezim dan Organisasi Internasional. In *Rezim dan Organisasi Internasional* (p. 43). Malang: Intrans Publishing.
- Holsti, O. (2006). The Three-Headed Eagle, The United States and System Change. In *Making American Foreign Policy* (pp. 89-102). New York: Routledge.
- Ibrahim, A. (2016). From Independence to Democracy (1948-2010). In *The Rohingyas, Inside Myanmar's Hidden Genocide* (p. 51). New York: Oxford University Press.
- Kementerian Luar Negeri RI. (2015). Rohingya: Antara Solidaritas ASEAN dan Kemanusiaan. In *Majalah Masyarakat ASEAN Edisi 8* (p. 10). Jakarta Pusat.

- Leider, J. (2012). On the term "Rohingya". *Rohingya - A historical and Linguistic Note*, 1.
- Lindblom, A. (2015). *Rohingya Under Military Rule. Persecutiin of the Rohingya Muslims*, 11.
- Mahbubani, K., & Sng, J. (2017). In *Keajaiban ASEAN - Penggerak Perdamaian* (p. 5). Singapore: NUS Press.
- Mazhar, M. S., & Goraya, N. (2016). *Plight Of Rohingya Muslims*, 29.
- Mingst, K. (1999). In *International Organizations: The Politics and Processes of Global Governance* (pp. 241-245). Boulder, Colorado: Lynne Rienner Publishers.
- Rosyidin, M. (2016). GLOBAL & STRATEGIS. *Intervensi Kemanusiaan dalam Studi Hubungan Internasional: Perdebatan Realis Versus Konstruktivis*, 58.
- Ryan, S. (1995). In *Ethnic conflict and the United Nations, 2nd* (p. 104). England: Dartmouth Publishing Company Limited.
- Skutsch, C. (2005). Arakanese. In *Encyclopedia of the World's Minorities* (p. 128). New York: Routledge.
- Sugito. (2016). In *Organisasi Internasional: Aktor dan Instrumen dalam Hubungan Internasional* (p. 8). Yogyakarta: The Phinisi Press.

- Tan, A. T. (2009). State terrorism in Arakan. In *A Handbook of Terrorism and Insurgency in Southeast Asia* (p. 327). Massachusetts: Edward Edgar Publishing. Inc.
- Tha, T. B. (2007). A Short History of Rohingya and Kamans of Burma. 3.
- Thwin, M. A., & Thwin, M. A. (2013). Reconstruction and Nation-Building. In *A History of Myanmar since Ancient Times: Traditions and Transformations* (p. 247). London: Reaktion Books Ltd.
- Ullah, A. (2017, Mei 24). *The Concept of Citizenship in Burma and the Status of Rohingyas*. Retrieved from The Stateless Rohingyas:
<http://www.thestateless.com/2017/05/the-concept-of-citizenship-in-burma-and-the-status-of-rohingyas.html>
- UNCHR. (2000). In *The State of the World's Refugees, 2000: Fifty Years of Humanitarian Action* (p. 75). New York: Oxford University Press.
- United Nations. (2014). Resolutions adopted by the Conference. *Report of the third International Conference*, (p. 13). New York.
- Waluyo, T. J. (2013). Konflik Tak Seimbang Etnis Rohingya dan Etnis Rakhine di Myanmar. *Jurnal Transnasional Vol. 4 No. 2*, 841.
- Yegar, M. (2002). Muslim Settlement in Arakan. In *Between Integration and Secession* (p. 24). Oxford: Lexington Books.

Website

Abrar, C. (2003, Juni 22). *Repatriation of Rohingya Refugees*. Retrieved from Burmalibrary: <http://www.burmalibrary.org/docs/Abrar-repatriation.htm>

Affan, H. (2017, September 6). *Krisis Rohingya, mengapa ASEAN tidak mampu berperan?* Retrieved from BBC Indonesia: <http://www.bbc.com/indonesia/indonesia-41160293>

Ahmed, A. (2012, Januari 30). *The Rohingya: Myanmar's Outcasts*. Retrieved from Al Jazeera: <https://www.aljazeera.com/indepth/opinion/2012/01/201212710543198527.html>

ASEAN Secretariat News. (2012, July 13). *ASEAN Heeds Concerns for the Rohingya Tension*. Retrieved from ASEAN: <http://asean.org/asean-heeds-concerns-for-the-rohingya-tension/>

BBC. (2011, Februari 22). *Thailand and Cambodia to accept monitors for border row*. Retrieved from BBC News: <http://www.bbc.co.uk/news/world-asia-pacific-12534980>

BBC Indonesia. (2017, September 17). *Bantuan Indonesia untuk Rohingya di Bangladesh 'mulai dibagikan hari ini'*. Retrieved from BBC: <http://www.bbc.com/indonesia/indonesia-41302028>

- BBC Indonesia. (2017, September 6). *Siapakah Tentara Pembebasan Rohingya Arakan?* Retrieved from BBC: <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-41173529>
- Benhorin, Y. (2007, September 25). *Livni has surprise meeting with Qatari emir.* Retrieved from Ynetnews: <https://www.ynetnews.com/articles/0,7340,L-3453593,00.html>
- Cochrane, L. (2016, December 19). *ASEAN meeting on Rohingya 'genocide' ends with humanitarian access promise.* Retrieved from ABC News: <http://www.abc.net.au/news/2016-12-20/asean-meeting-on-rohingyas-secures-humanitarian-access-promise/8133666#>
- Cochrane, L. (2017, November 21). *Myanmar's discrimination against Rohingya Muslims is 'apartheid': Amnesty International.* Retrieved from ABC News: <http://www.abc.net.au/news/2017-11-21/myanmar-discrimination-against-rohingya-apartheid-amnesty-report/9177590>
- Deutsche Welle. (2015, Mei 13). *Thailand, Malaysia dan Indonesia Tolak Manusia Perahu Rohingya.* Retrieved from Deutsche Welle: <http://p.dw.com/p/1FP1j>
- Gerin, R. (2016, Desember 19). *Aung San Suu Kyi Discusses Rakhine Crisis With ASEAN Foreign Ministers.* Retrieved from Radio Free Asia: <https://www.rfa.org/english/news/myanmar/aung-san->

suu-kyi-discusses-rakhine-crisis-with-asean-foreign-
ministers-12192016145727.html

Human Right Watch. (2000). *DISCRIMINATION IN ARAKAN*. Retrieved from Human Right Watch: <https://www.hrw.org/reports/2000/burma/burm005-02.htm>

Human Right Watch. (2013, Mei 28). *Burma: Revoke 'Two-Child Policy' For Rohingya*. Retrieved from Human Right Watch: <https://www.hrw.org/news/2013/05/28/burma-revoke-two-child-policy-rohingya>

Human Right Watch. (2015, May 1). *Thailand: Mass Graves of Rohingya Found in Trafficking Camp*. Retrieved from Human Right Watch: <https://www.hrw.org/news/2015/05/01/thailand-mass-graves-rohingya-found-trafficking-camp>

Human Rights Watch. (2000, Mei 29). *Burmese Refugees in Bangladesh*. Retrieved from Human Rights Watch: <https://www.hrw.org/report/2000/05/01/burmese-refugees-bangladesh/still-no-durable-solution>

Human Rights Watch. (2015 , Mei 14). *Southeast Asia: End Rohingya Boat Pushbacks*. Retrieved from Human Rights Watch: <https://www.hrw.org/news/2015/05/14/southeast-asia-end-rohingya-boat-pushbacks>

Human Rights Watch. (2016, December 21). *Burma: Rohingya Recount Killings, Rape, and Arson*. Retrieved

from Human Rights Watch:
<https://www.hrw.org/news/2016/12/21/burma-rohingya-recount-killings-rape-and-arson>

Islam, N. (2006, October 5). *Facts About the Rohingya Muslims of Arakan*. Retrieved from Arakan Rohingya National Organisation:
<http://www.rohingya.org/portal/index.php/learn-about-rohingya.html>

Kassim, Y. R. (2012, November 6). *Plight of the Rohingya: ASEAN Credibility Again at Stake*. Retrieved from ReliefWeb: <https://reliefweb.int/report/myanmar/plight-rohingya-asean-credibility-again-stake>

Kementerian Luar Negeri. (2016, Desember 19). *Menlu Retno: ASEAN Ambil Aksi Konkret Untuk Kembalikan Stabilitas di Rakhine State*. Retrieved from Kementerian Luar Negeri RI:
<https://www.kemlu.go.id/id/berita/Pages/Menlu-Retno-ASEAN-ambil-aksi-konkret-untuk-kembalikan-stabilitas-di-Rakhine-State.aspx>

Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. (2015, Maret 17). *Sejarah dan Latar Pembentukan ASEAN*. Retrieved from Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia:
<https://www.kemlu.go.id/id/kebijakan/asean/Pages/Sejarah-dan-Latar-Pembentukan-ASEAN.aspx>

Kementerian Luar Negeri RI. (2016, Desember 7). *Menlu Retno Tekankan Keprihatinan Indonesia Saat Bahas Situasi Rakhine State Dengan State Counsellor Daw*

Aung San Suu Kyi. Retrieved from Kementerian Luar Negeri Indonesia: <https://www.kemlu.go.id/id/berita/Pages/Menlu-Retno-Tekankan-Keprihatinan-Indonesia-Saat-Bahas-Situasi-Rakhine-State.aspx>

Kompas.com. (2011, Februari 22). *Penyelesaian Konflik Thailand-Kamboja* . Retrieved from Kompas.com: <https://internasional.kompas.com/read/2011/02/22/17270840/Penyelesaian.Konflik.Thailand-Kamboja>

Lintner, B. (2003, Juli). *Bangladesh: Extremist Islamist Consolidation*. Retrieved from South Asia Terrorism Portal: <http://www.satp.org/satporgtp/publication/faultlines/volume14/Article1.htm>

Lwin, E. E., & McLaughlin, T. (2014, September 6). *Government rejects repatriation reports*. Retrieved from Myanmar Times: <https://www.mmtimes.com/national-news/11561-govt-rejects-rohingya-repatriation-reports.html>

Marjanovic, M. (2011, April 4). *Is Humanitarian War the Exception?* Retrieved from Mises Institute: <https://mises.org/library/humanitarian-war-exception>

Ministry of Foreign Affairs Singapore. (2008, July 21). *Transcript of Door-stop Interview by Minister for Foreign Affairs George Yeo*. Retrieved from <https://www1.mfa.gov.sg/Newsroom/Press-Statements-Transcripts-and-Photos/2008/07/Transcript-of->

Doorstop-Interview-by-Minister-for-Foreign-Affairs-
George-Yeo-on-the-Temple-of-Preah-V

- NBC News. (2008, Juni 5). *Aid-laden U.S. Ships Abort Cyclone Mission*. Retrieved from NBC News: http://www.nbcnews.com/id/24958259/ns/world_news-asia_pacific/t/aid-laden-us-ships-abort-cyclone-mission/#.WrZCcnpua00
- Popham, P. (2015, May 15). *Asia's migrant crisis: Thousands of trafficked boat people cast back out to sea by Indonesia, Malaysia and Thailand*. Retrieved from Independent: <https://www.independent.co.uk/news/world/asia/asias-migrant-crisis-thousands-of-trafficked-boat-people-cast-back-out-to-sea-by-indonesia-malaysia-10254262.html>
- Razali, H. (2017, September 13). *Aktivis HAM: Militer tak hanya melakukan persekusi terhadap etnis Rohingya di Myanmar*. Retrieved from Rappler: <https://www.rappler.com/indonesia/berita/182041-militer-tidak-hanya-persekusi-etnis-rohingya-myanmar>
- ReliefWeb. (2008, May 06). *U.S. provides \$3.25 million to aid Burma cyclone victims*. Retrieved from ReliefWeb: <https://reliefweb.int/report/myanmar/us-provides-325-million-aid-burma-cyclone-victims>
- Resource Information Center. (1999, Desember 7). *Burma: Information on Rohingya Refugees*. Retrieved from Refworld: <http://www.refworld.org/docid/3ae6a6a41c.html>

- Reuters. (2012 , Juni 9). *Four killed as Rohingya Muslims riot in Myanmar: government*. Retrieved from REUTERS: <https://www.reuters.com/article/us-myanmar-violence/four-killed-as-rohingya-muslims-riot-in-myanmar-government-idUSBRE85714E20120608>
- Santi , N. K. (2015, May 22). *RI Sambut Baik Komitmen Myanmar atas Pengungsi Rohingya*. Retrieved from Viva: <https://www.viva.co.id/berita/dunia/628828-ri-sambut-baik-komitmen-myanmar-atas-pengungsi-rohingya>
- Shams, S. (2017, September 12). *Rohingya people in Myanmar: what you need to know*. Retrieved from Deutsche Welle: <http://www.dw.com/en/rohingya-people-in-myanmar-what-you-need-to-know/a-40340067>
- The Guardian. (2016, Oktober 10). *Myanmar says nine police killed by insurgents on Bangladesh border*. Retrieved from The Guardian: <https://www.theguardian.com/world/2016/oct/10/myanmar-nine-police-killed-insurgents-bangladesh-border>
- The Telegraph. (2002, Desember 6). *General Ne Win*. Retrieved from The Telegraph: <https://www.telegraph.co.uk/news/obituaries/1415295/General-Ne-Win.html>
- Tuwo, A. G. (2016, Desember 9). *Kala PM Malaysia Ikut Demo, Ini yang Dilakukan RI untuk Rohingya*. Retrieved from Liputan 6:

<https://www.liputan6.com/global/read/2673655/kala-pm-malaysia-ikut-demo-ini-yang-dilakukan-ri-untuk-rohingya>

Ullah, A. (2017, Mei 24). *The Concept of Citizenship in Burma and the Status of Rohingyas*. Retrieved from The Stateless Rohingya: <http://www.thestateless.com/2017/05/the-concept-of-citizenship-in-burma-and-the-status-of-rohingyas.html>

Viva Media. (2011, Februari 22). *RI Diminta Redam Konflik Thailand-Kamboja*. Retrieved from Viva: <https://www.viva.co.id/berita/dunia/205963-ri-diminta-tengahi-konflik-thailand-kamboja>

Wisnu, D. (2016, July 27). *ASEAN dan Konsensus*. Retrieved from Koran Sindo: http://koran-sindo.com/page/news/2016-07-27/0/3/ASEAN_dan_Konsensus